

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
DALAM UPAYA PEMANFAATAN FASILITAS PEMBANGUNAN 3 PILAR  
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

**SKRIPSI**

Disajikan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri  
Sultan Syarif Kasim Riau



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH**

**ZIKRA YUNILASMI**

**NIM. 11624204125**

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA SIYASAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**1441H/2020M**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

Skripsi yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Pemanfaatan Fasilitas Pembangunan 3 Pilar Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah” ditulis oleh :

Nama : ZIKRA YUNILASMI

NIM : 11624204125

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Juli 2020  
Pembimbing Skripsi



Haswari, M.Ag

NIP. 19691119 199603 1 002

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul, “KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM UPAYA PEMANFAATAN FASILITAS PEMBANGUNAN 3 PILAR PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”, yang ditulis oleh :

Nama : ZIKRA YUNILASMI  
NIM : 11624204125  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 11 Agustus 2020  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Secara Online (Daring)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Agustus 2020  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**H. Rahman Alwi, M.Ag.**

Sekretaris  
**Irfan Zulfikar, M.Ag.**

Penguji I  
**Ade Fariz Fakhrollah, M.Ag.**

Penguji II  
**Dr. Hj. Hertina, M.Pd.**



Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**

NIP. 19580712 196803 1 005



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Likra Yunilasmi (2020) : *Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Upaya Pemanfaatan Fasilitas Pembangunan 3 Pilar Perspektif Fiqh Siyasah.***

Adapun penulisan skripsi ini berlatar belakang dari banyaknya bangunan atau fasilitas pembangunan di Kabupaten Kuantan Singingi yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Seharusnya, bangunan yang sudah selesai pembangunannya harus dimanfaatkan guna kepentingan masyarakat dan agar terkesan tidak menghabiskan anggaran semata.

Dalam penelitian ini, penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan diantaranya mengenai Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap pemanfaatan fasilitas pembangunan 3 pilar yang merupakan pembangunan infrastruktur berupa Universitas, Hotel dan Pasar Modern yang belum bisa difungsikan sebagaimana mestinya. Kemudian, kendala yang dihadapi pemerintah dalam upaya-upaya menetapkan kebijakan dan tinjauan fiqh siyasah terhadap permasalahan tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Kuantan Singingi dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui observasi, dan wawancara sebagai data primer yang dihimpun dari pihak BAPPEDALITBANG dan DPRD Kabupaten Kuantan Singingi. Sedangkan data sekunder merupakan data yang didapat dari buku-buku, dokumentasi yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti. Setelah data tersebut diperoleh, lalu dianalisa dengan deskriptif kualitatif. Melalui wawancara dan observasi di lapangan penulis memperoleh hasil setelah mengetahui permasalahan yang ada, maka penulis meninjau dengan pandangan Fiqh Siyasah dengan menampilkan nash Al-Qur'an, hadist, dan kaedah fiqhiyah untuk mempertegas kesimpulan yang ditarik.

Dari uraian yang disajikan dan dari tinjauan yang telah dilakukan, maka penulis memperoleh jawaban bahwasannya terkait kebijakan pemerintah terhadap pemanfaatan fasilitas pembangunan 3 Pilar Kabupaten Kuantan Singingi adalah sesuatu yang belum sepenuhnya sesuai dengan Tinjauan Fiqh Siyasah, dikarenakan dalam upaya penetapan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terdapat beberapa sikap yang menyebabkan beberapa kebijakan kurang berjalan optimal hingga menyebabkan fasilitas pembangunan 3 Pilar tidak dapat segera dimanfaatkan.

**Kata kunci:** Kebijakan, Pemerintah Daerah, Fiqh Siyasah



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT yang Maha Mengasihi dan Maha Adil, yang telah memberikan kesehatan dan keluangan waktu kepada penulis untuk dapat menyusun skripsi ini, tanpa hidayah dan taufiq-Nya tidak mungkin skripsi ini dapat diselesaikan seperti saat sekarang ini.

Shalawat dan salam kehadiran junjungan alam, sang revolusioner yang disegani oleh kawan dan lawan, yaitu Nabi Muhammad SAW, berkat perjuangan beliaulah Islam tersebar di berbagai penjuru dunia, sehingga umatnya terasa tentram dan damai atas ajaran-ajaran yang dibawanya.

Skripsi ini berjudul “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Pemanfaatan Fasilitas Pembangunan 3 Pilar Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah”. Dalam penulisan ini penulis banyak menemukan kesulitan-kesulitan dan rintangan disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana serta ilmu yang penulis miliki. Tanpa bantuan dan motivasi dari semua pihak, skripsi ini tidak akan selesai sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Ramadan, ibunda Emi Darnis , adik Fivi Yuliza, Puja Sukma Emita dan Gilfa Oktiara Putri yang telah memberikan bantuan materil, moril maupun spirituail kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag, selaku Rektor UIN SUSKA RIAU dan seluruh jajaran civitas akademika UIN SUSKA RIAU
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum bapak Dr. H. Hajar, M.Ag, Wakil Dekan I bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, M.CL, Wakil Dekan II bapak Dr. Wahidin, M.Ag, dan bapak Wakil Dekan III Dr.H. Maghfirah, MA.
4. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) bapak Rahman Alwi, M.Ag serta Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) bapak Irfan Zulfikar M.Ag yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.
5. Bapak Haswir M.Ag selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Penasehat Akademis (PA) penulis yang selalu memberikan saran-saran dan motivasi kepada penulis selama kuliah di UIN SUSKA RIAU ibu Dr. Jumni Nelli M.Ag
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya dan seluruh dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada umumnya, yang telah memberikan ilmu serta pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di UIN SUSKA RIAU.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak Ir. Maisir selaku Kepala BAPPEDALITBANG Kabupaten Kuantan Singingi, Bapak Zulhendri selaku Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kuantan Singingi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi narasumber dalam penelitian yang penulis lakukan.

9. Untuk Sahabat dan Teman-Teman. Generasi Ke-7 Alumni SMAN Negeri Pintar Kuantan Singingi (AVENGER), Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN SUSKA RIAU, Pengurus SEMA Fakultas Syariah Tahun 2019, Anggota KKN Teluk Pauh Tahun 2019, Seluruh kader HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Cabang Pekanbaru dan diseluruh Indonesia yang telah menjadi teman berdiskusi bagi penulis.

10. Untuk semua keluarga, sahabat, teman, inspirator dan orang-orang spesial dalam hidup penulis yang memberikan motivasi dan nasehat, yang namanamanya tak dapat disebutkan satu-persatu, penulis ucapkan terimakasih atas semuanya. Hanya Allah SWT yang bisa membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri dan kepada manusia penulis mohon maaf dan semoga apa-apa yang kita kerjakan mendapat keridhoan dari Allah SWT. Amin ya robbalalamin.

Pekanbaru, 29 Juni 2020

Penulis

**Zikra Yunilasm**  
NIM. 11624204125



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
 <b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	12
 <b>BAB II    TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Gambarann Umum    Kabupaten Kuantan Singingi.....	14
1. Sejarah Singkat Kabupaten Kuantan Singingi .....	14
2. Visi dan Misi Kabupaten Kuantan Singingi.....	17
3. Geografi dan Iklim Kabupaten Kuantan Singingi.....	21
4. Demografi Kabupaten Kuantan Singingi .....	23
5. Kondisi Sosial Masyarakat Kuantan Singingi.....	25
B. Gambaran Umum BAPPEDALITBANG Kuantan Singingi	
1. Sejarah Bappedalitbang .....	37
2. Struktur Organisasi.....	42
 <b>BAB III    TINJAUAN TEORITIS TENTANG KEBIJAKAN               PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM UPAYA</b>	

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEMANFAATAN FASILITAS PEMBANGUNAN 3 PILAR  
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

A. Konsep Kebijakan .....	38
B. Pemerintahan Daerah dalam Ketatanegaraan Islam .....	42
C. Konsep Otonomi Daerah di Indonesia dan dalam Prespektif Islam .....	46
D. Konsep Pemanfaatan Fasilitas Pembangunan .....	52
E. Konsep Pengelolaan Aset Menurut Islam .....	53
F. Fiqh Siyasa .....	54

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Peran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Terkait Upaya-Upaya Pemanfaatan Fasilitas Pembangunan 3 Pilar Kuantan Singingi .....	69
B. Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Upaya Pemanfaatan Fasilitas Pembangunan 3 Pilar Kuantan Singingi .....	77
C. Tinjauan Fiqh Siyasa Terkait Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Pemanfaatan Fasilitas 3 Pilar Kuantan Singingi .....	83

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	91
B. Saran .....	92

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

**LAMPIRAN**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel II.1. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi .....	25
Tabel II.2. Rumah Ibadah Surau Menurut Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi .....	26
Tabel II.3. Rumah Ibadah Wihara Menurut Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi .....	27
Tabel II.4. Rumah Ibadah Gereja Menurut Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi .....	28
Tabel II.5. Rumah Ibadah Surau Menurut Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi Masjid .....	29
Tabel II.7. SD,SMP,SMA dan SMK di Setiap Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi .....	30
Tabel II.11. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kuantan Singingi	32

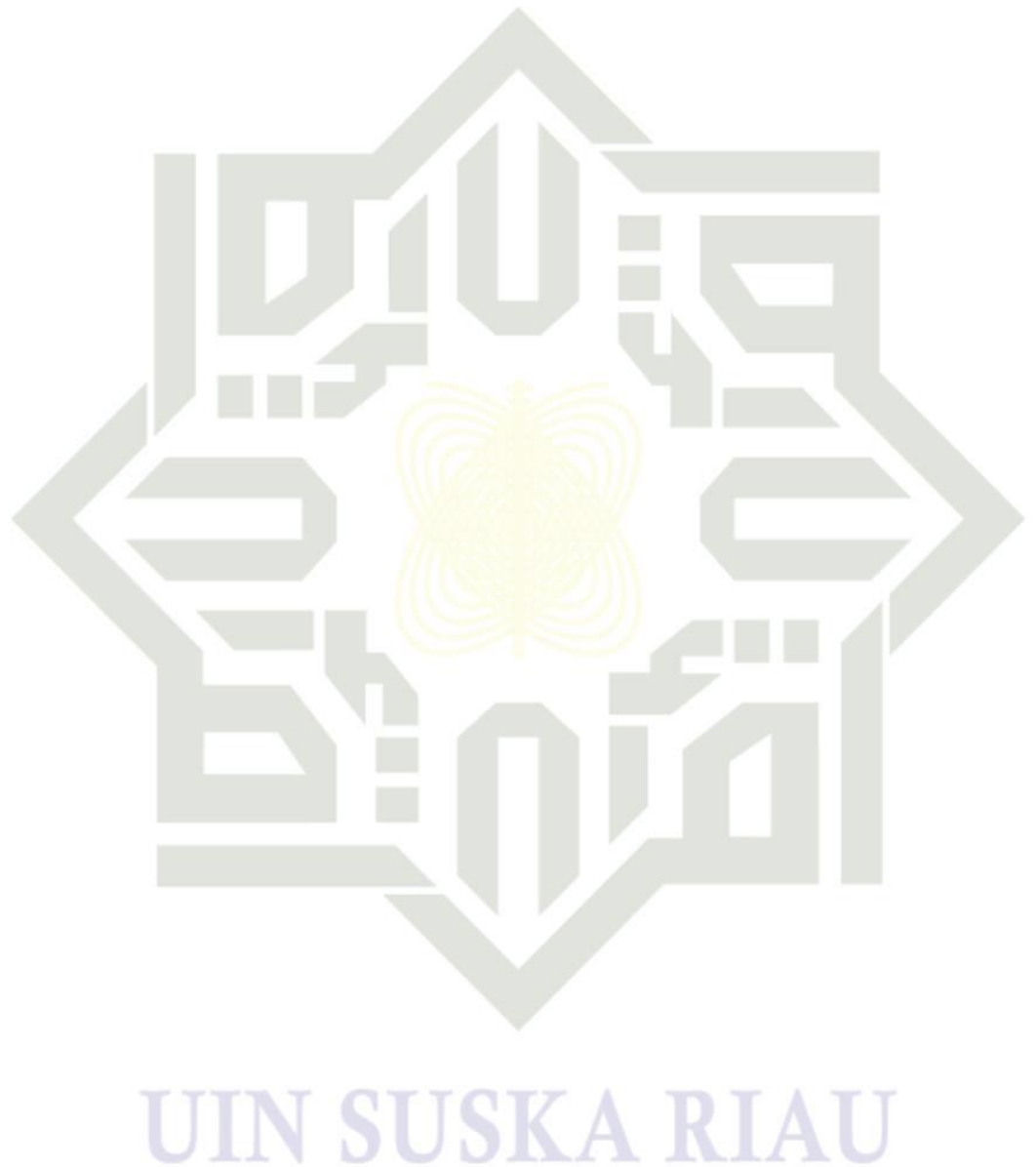


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar II.1 . Peta Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.....	17
Gambar II.1 . Struktur Organisasi BAPPEDALITBANG Kabupaten Kuantan Singingi .....	37





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam suatu telaah terhadap seratus tokoh paling berpengaruh di dunia, Muhammad saw. diakui sebagai seorang tokoh paling berpengaruh dan menduduki rangking pertama.<sup>1</sup> Kepemimpinan Nabi Muhammad Saw. merupakan kepemimpinan yang ideal jika dilihat dari berbagai rujukan perihal kepemimpinan yang baik. Akan tetapi, di sini penulis mencoba menganalisis dan mengarahkan pada satu temuan bahwa kepemimpinan Nabi Muhammad dapat dikategorisasikan dalam salah satu tipe atau model kepemimpinan yang terbaru. Berdasarkan teori kepemimpinan transformasional yang didefinisikan sebagai teori terbaru. Dijelaskan sebagai sikap seorang pemimpin yang mampu mempengaruhi atau mengarahkan bawahan dengan cara yang efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.<sup>2</sup>

Seorang pemimpin yang telah diberikan amanah, wajib untuk menunaikannya sesuai dengan amanah yang telah diberikan kepadanya. Namun, perlu ditegaskan bahwa tugas utama dari seorang pemimpin adalah membuat

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),.hlm.40

<sup>2</sup> Nashria Rahayuning Tyas, *Model Kepemimpinan* (Jurnal Muslim Heritage. vol. 4 No 2, November 2019), hlm. 276

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan yang dapat memberikan mashlahat bagi masyarakatnya. Sebagaimana Kaidah Fiqh Siyasah<sup>3</sup>:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”

A. Djazuli menempatkan kaidah ini di urutan pertama sebagai kaidah Fiqh Siyasah. Menurutnya, Fiqh Siyasah adalah hukum Islam yang objek bahasannya tentang kekuasaan yang meliputi hukum tata negara, administrasi negara, hukum internasional dan hukum ekonomi. Fiqh Siyasah pun berbicara tentang hubungan antara rakyat dan pemimpinnya sebagai penguasa yang konkret di dalam ruang lingkup satu negara atau antar negara atau dalam kebijakan-kebijakan baik nasional maupun internasional. Oleh karena seorang pemimpin rakyat memiliki hak penuh terhadap rakyatnya, maka seorang pemimpin juga memiliki kewajiban membawa rakyatnya kepada kedamaian dan dalam memerintah harus menimbulkan kemaslahatan.

Pemimpin merupakan sebuah keniscayaan dalam sebuah perkumpulan ataupun suatu badan. Karena tanpa seorang pemimpin maka suatu perkumpulan tidak akan berjalan dengan baik. Berkaitan dengan kebijakan seorang pemimpin maka tak akan jauh dari pembahasan mengenai program pembangunan, baik itu berupa infrastruktur maupun pembangunan terhadap sumber daya manusia (SDM).

<sup>3</sup> A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana 2010) hlm.147



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional bahwa pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.<sup>4</sup> Tujuan pembangunan nasional tersebut pada hakikatnya adalah untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat yang ada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan nasional akan terwujud apabila didukung situasi dan kondisi yang tertib dalam menyelenggarakan pemerintahan baik di tingkat pusat, daerah maupun di tingkat desa.

Kabupaten Kuantan Singingi resmi dimekarkan dari Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang No. 53 Tahun 1999. Maka dianggap perlu menakar arah kebijakan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat sebagai pondasi yang kuat untuk menopang daerah tersebut berdiri, baik itu dari segi ekonomi, pendidikan, budaya, pariwisata, sosial dan politik.

Suksesi kepemimpinan harus terus dilakukan guna melahirkan pemimpin yang mumpuni. sebagai bangsa yang menganut prinsip-prinsip demokrasi para pemimpin yang terpilih diharapkan memiliki *track record* yang jelas dan telah teruji secara nyata di lapangan.<sup>5</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), suksesi merupakan proses pergantian kepemimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada periode 2011-2016 pergantian pemimpin di Kabupaten Kuantan Singingi sejak awal berdirinya telah memasuki periode ke-3, ketika itu H. Sukarmis yang dikenal oleh masyarakat sebagai Bapak Pembangunan

<sup>4</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional

<sup>5</sup> Muhammad Khidri Alwi, *Kepemimpinan Dalam Perspektif Hadist*, Jurnal (UIN Ar-Raniry Makassar: 2019) Vol.6.No 1. hlm. 1

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kuantan Singingi terpilih untuk periode yang ke-2. Pada masa periode ke-2 setelah terpilih kembali menjadi Bupati Kuantan Singingi, dalam rapat paripurna bersama Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi Bupati H. Sukarmis mengusulkan untuk segera dilakukan program pembangunan 3 Pilar di Kuantan Singingi yaitu pembangunan Hotel Kuantan Singingi, Universitas Islam Kuantan Singingi dan Pasar Berbasis Modern.

Program pembangunan 3 Pilar dimasukkan ke dalam Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011-2016 pada tahun 2015. RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan mengacu kepada RPJP Nasional tahun 2005-2025, RPJPD Provinsi Riau tahun 2005-2025 dan RPJPD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2005-2025. Penyusunan RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi akan mempengaruhi tata ruang kabupaten. Proses pembangunan 3 Pilar Kuantan Singingi ditargetkan selesai pada tahun 2015 dengan dasar hukum mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.<sup>6</sup>

Namun yang menjadi permasalahan hingga hari ini adalah bangunan yang telah selesai dibangun pada tahun 2015, dimana bangunan Hotel Kuantan Singingi telah dilengkapi dengan fasilitas dan perabotan disetiap *room* bahkan telah dialiri arus listrik, sayangnya belum bisa dimanfaatkan dan difungsikan sebagaimana mestinya. Begitu juga dengan bangunan Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah berdiri megah di tengah Kota Teluk Kuantan belum bisa ditempati oleh

<sup>6</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

civitas akademika. Padahal dana yang telah dialokasikan untuk program pembangunan ini telah mencapai Rp. 140 miliar.<sup>7</sup>

Bangunan 3 Pilar yang telah selesai dibangun sejak tahun 2015 lalu namun belum diresmikan hingga tahun 2019 menyebabkan beberapa bagian bangunan tak terawat dan lapuk serta tumbuhnya semak-semak di sekitar bangunan. Jika hal ini terus dibiarkan tentu akan semakin terkesan mubazir dan menghabiskan anggaran semata mengingat betapa banyak dana yang telah dihabiskan untuk proses pembangunan 3 Pilar ini.

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang hari ini berada di bawah kepemimpinan Bupati Mursini terus berupaya membuat kebijakan untuk segera memfungsikan bangunan 3 Pilar. Hal ini terlihat dari langkah-langkah kongkret yang dilakukan pemerintah untuk segera melunasi hutang kepada rekanan dengan mengganggarkan dana pada Rancangan APBD Kabupaten Kuantan Singingi yang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.<sup>8</sup> Karena terus mendapat desakan dari masyarakat yang berulang kali melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Kuantan Singingi dan Kantor Bupati Kuantan Singingi, akhirnya pada Agustus 2019 masyarakat Kuantan Singingi seperti mendapat angin segar, pasalnya pemerintah telah meresmikan 1 Pilar Kuantan Singingi yaitu Pasar Modern. Sekarang yang masih bermasalah adalah Bangunan Hotel Kuantan Singingi dan Bangunan Universitas Islam Kuantan Singingi.

<sup>7</sup> Asripilyadi, *Kuantan Singingi Tetapkan Tiga Pilar pembangunan* dari <http://riau.antarnews.com>, diakses pada 22 maret 2020 pukul 08.55 WIB.

<sup>8</sup> Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk menelitinya dengan judul: **“KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM UPAYA PEMANFAATAN FASILITAS PEMBANGUNAN 3 PILAR PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”**

#### B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, penulis membatasi permasalahan dengan memfokuskan pada kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam waktu 5 tahun terakhir terkait upaya untuk pemanfaatan fasilitas pembangunan 3 Pilar.

#### C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut penulis menemukan permasalahan yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam upaya pemanfaatan fasilitas pembangunan 3 Pilar Kuantan Singingi.
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam menetapkan kebijakan untuk pemanfaatan fasilitas pembangunan 3 Pilar Kuantan Singingi.
3. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasaah terhadap kebijakan pemerintah dalam upaya pemanfaatan fasilitas pembangunan 3 Pilar Kuantan Singingi.

#### D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

##### Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apakah telah dilakukan upaya dalam menetapkan kebijakan untuk pemanfaatan fasilitas pembangunan 3 Pilar Kuantan Singingi.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pemerintah dalam membuat kebijakan untuk pemanfaatan 3 Pilar sehingga tidak dilakukannya peresmian bangunan hingga hari ini.
- c. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Siyasah terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

##### 2. Manfaat Penelitian

- a. Agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai hal-hal yang berhubungan dengan topic penelitian ini, yaitu tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam upaya pemanfaatan fasilitas pembangunan 3 Pilar.
- b. Agar dapat memberikan bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam upaya menetapkan kebijakan untuk segera memanfaatkan fasilitas pembangunan 3 Pilar.
- c. Agar dapat memberikan sumbangan ilmiah kepada civitas akademika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- d. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

##### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Metode Penelitian

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di lapangan. Penelitian ini berdasarkan pada objek penelitian melalui observasi dan wawancara yang dilakukan kepada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk mendapatkan data primer.

### Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau khususnya di Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) dan Kantor DPRD Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun alasan dipilihnya lokasi ini yakni dengan pertimbangan bahwa BAPPEDALITBANG dan DPRD Kabupaten Kuantan Singingi memiliki peran penting dalam upaya pemanfaatan fasilitas pembangunan daerah dan dalam upaya penetapan kebijakan yang menjadi data penting dalam pengumpulan data pada penelitian ini.

### Subjek dan Objek Penelitian

- a. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Yang menjadi objek penelitian adalah kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap pemanfaatan fasilitas pembangunan 3 Pilar (Hotel Kuantan Singingi, Universitas Kuantan Singingi, dan Pasar Modern).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian berupa manusia, gejala, benda, pola sikap, tingkah laku dan sebagainya yang menjadi objek penelitian.<sup>9</sup>

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh instansi pemerintah kabupaten kuantan singing termasuk dprd kabupaten kuantan singing. Secara umum terdapat 28 instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi baik berupa badan maupun dinas. Berdasarkan populasi yang ada maka penentuan sampel pada penelitian ini adalah dengan *Purposive Sampling* yaitu pengambilan sampel didasarkan pada seleksi khusus atau kriteria tertentu yang dibuat oleh peneliti siapa yang akan dijadikan sebagai informan, atau dengan kata lain pengambilan sampel ini didasarkan pada tujuan penelitian. Dengan demikian dari beberapa instansi yang ada, sampel dalam penelitian ini adalah Ketua Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kuantan Singingi dan Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi.

#### Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan atau informan dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori, yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu yang diambil langsung dari pihak informan yakni Ketua Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kuantan Singingi dan Waka I DPRD Kabupaten Kuantan Singingi.

<sup>9</sup> Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Pustakasetia, 2011) hlm. 154.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Data sekekunder, adalah data yang diperoleh dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti.<sup>10</sup>

### Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data sesuai dengan keperluan penelitian, maka diperlukan teknik pengumpulan data, dalam hal ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi, adalah pengamatan langsung terhadap objek dalam suatu periode tertentu dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal yang diamati.<sup>11</sup> Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang pada pokoknya mengamati gejala fisik dan sosial sesuai keadaan sebenarnya. Hal yang diobservasi adalah aspek tingkah laku manusia mengenai gejala alam, ataupun mengenai proses perubahan yang nampak.<sup>12</sup>
- b. Wawancara, yaitu peneliti melakukan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada responden. Menurut Muhammad Musa dan Titi Nurfitri “salah satu metode pengumpulan data dengan jalan wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada narasumber.<sup>13</sup>

<sup>10</sup> Amiruddin, *Op Cit.* hlm.30

<sup>11</sup> Wayan Nurkencana, *Pemahaman Individu* (Surabaya: Usaha Nasional, 1990),

hlm. 35

<sup>12</sup> Winarno Surahman, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Teratai 1985), hlm. 165

<sup>13</sup> Muh. Musa, Titi Nurfitri, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Fajar Agung, 1988), hlm. 49

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Dokumentasi, adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.<sup>14</sup>

#### Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu penulis mengklasifikasikan data-data yang terkumpul dari lapangan. Kemudian, data tersebut diidentifikasi, dianalisis dan diuraikan antara data yang satu dengan yang lain lalu dihubungkan untuk ditarik kesimpulan atau gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

#### 8. Metode Penulisan

- a. Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan subyek dan obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.
- b. Induktif, yaitu dengan mengambil fakta-fakta atau data-data yang berhubungan dengan penelitian, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deduktif, yaitu dengan mengambil teori-teori kemudian diambil kesimpulan secara khusus.

#### F. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan penulis dalam menyelesaikan tulisan ini maka, penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

<sup>14</sup> Burhan.Bungin, *Penelitian Kualitatif: Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Putra Grafika 2007), hlm. 121



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I : PENDAHULUAN**

Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II : TINJAUAN UMUM**

Bab ini berisikan uraian tentang gambaran umum Kabupaten Kuantan Singingi mengenai sejarah, letak geografis, dan kondisi masyarakat serta tinjauan tentang Kantor BAPPEDALITBANG, Struktur dan Mekanisme Kerja.

**BAB III : TINJAUAN TEORITIS**

Bab ini membahas konsep Kebijakan, Konsep Pemerintah Daerah, Konsep Pemanfaatan Fasilitas Pembangunan, Manajemen Aset dalam Islam dan Tinjauan Fiqh Siyasah.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas bagaimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kabupaten Kuantan Singingi dalam pemanfaatan fasilitas pembangunan 3 Pilar Kuantan Singingi, hambatan dan Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam upaya pemanfaatan fasilitas pembangunan 3 Pilar.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.



UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi

##### 1. Sejarah Singkat Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Riau, Indonesia. Kabupaten Kuantan Singingi awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Indragiri Hulu, namun setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan Ibukota berkedudukan di Teluk Kuantan.<sup>1</sup>

Pada saat Kabupaten Kuantan Singingi menjadi sebuah kabupaten definitif Kuantan Singingi terdiri dari 6 kecamatan dengan 151 pemerintahan desa/lurah sebagai berikut:

1. Kecamatan Kuantan Tengah
2. Kecamatan Singingi
3. Kecamatan Kuantan Mudik
4. Kecamatan Kuantan Hilir
5. Kecamatan Cerenti
6. Kecamatan Benai.

Sebagai pejabat Bupati Kuantan Singingi terhitung sejak 8 Oktober 1999 sampai dengan 8 Oktober tahun 2000 adalah Drs. H. Rusdi S. Abrus.

<sup>1</sup> Pasal 16 Undang-Undang No. 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Palawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian Pada bulan Oktober tahun 2000 diadakan pemilihan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi yang pertama yang dipilih oleh anggota legislatif. Terpilih sebagai bupati dan wakil bupati adalah pasangan Drs. H. Rusdji S Abrus dengan Drs.H.Asrul Ja'afar periode 2001-2006. Ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.24.133 tahun 2001 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.24.134, diangkat dan ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi. Selang waktu 2 bulan, Bupati Kuantan Singingi terpilih meninggal dunia, jabatan bupati digantikan langsung oleh wakil bupati, dan ditetapkan menjadi Bupati Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.24-316 tanggal, 20 Agustus 2001.<sup>2</sup>

Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya membawahi 6 (enam) kecamatan dimekarkan menjadi 12 (dua belas) kecamatan pada tahun 2002 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002. Pada tahun 2012 kembali dimekarkan menjadi 15 kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 2012. Berikut 15 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi:<sup>3</sup>

1. Kecamatan Hulu Kuantan
2. Kecamatan Kuantan Mudik
3. Kecamatan Pucuk Rantau

<sup>2</sup> *Sejarah Kabupaten Kuantan Singingi* , dari <https://kuansing.go.id> diakses pada 25 April 2020 pukul 21.25 WIB.

<sup>3</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 24 tahun 2012 Tentang Pembentukan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan Sentajo Raya Dan Kecamatan Pucuk Rantau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kecamatan Gunung Toar
5. Kecamatan Kuantan Tengah
6. Kecamatan Sentajo Raya
7. Kecamatan Benai
8. Kecamatan Pangean
9. Kecamatan Kuantan Hilir
10. Kecamatan Kuantan Hilir Seberang
11. Kecamatan Inuman
12. Kecamatan Cerenti
13. Kecamatan Singingi
14. Kecamatan Singingi Hilir
15. Kecamatan Logas Tanah Darat

Jarak antara Teluk Kuantan dengan Pekanbaru sebagai Ibu kota Provinsi Riau Pekanbaru adalah 160 KM. Batas wilayah administrasi Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan Provinsi Riau.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.

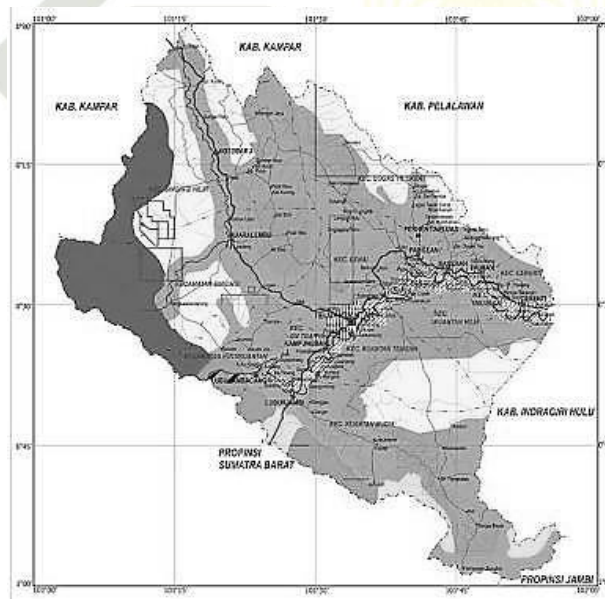
<sup>4</sup> Pasal 14 poin 7 Undang-Undang No. 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Kuantan Singingi berada pada wilayah perbatasan 3 Provinsi, yaitu Provinsi Riau, Jambi dan Sumatera Barat. Secara administrasi Kabupaten Kuantan Singingi dibagi menjadi 15 kecamatan, 11 kelurahan dan 218 desa. Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Kuantan Mudik, yaitu sebanyak 23 desa dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Pucuk Rantau sebanyak 10 desa. Kecamatan dengan luas wilayah terluas adalah Kecamatan Singingi (1.953,66 km<sup>2</sup>), kemudian diikuti dengan Kecamatan Singingi Hilir (1.530,97 km<sup>2</sup>).<sup>5</sup>

**Gambar II.1 Peta Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi**



## 2. Visi dan Misi Kabupaten Kuantan Singingi

### a. Visi Kabupaten Kuantan Singingi

<sup>5</sup>Sejarah Kuantan Singingi dari <https://kuansing.go.id/>, diakses pada 25 April 2020 pukul 21.25 WIB.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.<sup>6</sup> Visi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun adalah:

***“Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang Unggul, Sejahtera, dan Agamis di Provinsi Riau ”***

Adapun makna pernyataan visi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi di atas adalah sebagai berikut:

- 1.) Unggul adalah peningkatan kemampuan perekonomian masyarakat, derajat kesehatan, mutu pendidikan, infrastruktur dan pariwisata.
- 2.) Sejahtera adalah suatu kondisi masyarakat dalam keadaan makmur yang tidak lagi memikirkan kebutuhan dasar, dalam kehidupan tentram, tertib, dan harmonis.
- 3.) Agamis adalah suasana kehidupan sosial kemasyarakatan yang rukun dan damai dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya.

<sup>6</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Misi Kabupaten Kuantan Singingi<sup>7</sup>

- 1.) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pelayanan publik yang prima;
- 2.) Meningkatkan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan produktif;
- 3.) Mengembangkan perekonomian masyarakat yang mandiri dan berdaya saing guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat berbasis pertanian dan pariwisata;
- 4.) Meningkatkan tata kelola sumber daya alam berdasarkan perencanaan tata ruang yang berwawasan lingkungan;
- 5.) Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata;
- 6.) Meningkatkan suasana kehidupan yang agamis dan melestarikan nilai-nilai budaya.

Adapun Defenisi dari misi-misi yang telah tertuang adalah sebagai berikut :

- 1.) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pelayanan publik yang prima adalah penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih diarahkan pada pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan, partisipatif dan berkepastian hukum, diharapkan dapat menciptakan hubungan yang baik antara pemerintah daerah, masyarakat, pihak swasta dan pihak lainnya sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

<sup>7</sup> Visi Misi Kuantan Singingi, dari <https://kuansing.go.id/> diakses pada 29 April 2020 pukul 20.00 WIB.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2.) Meningkatkan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan produktif adalah peningkatan sumber daya manusia penyelenggara pembangunan yang peka terhadap kebutuhan daerah dan memiliki kapabilitas serta kualitas dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan yang bertanggung jawab sehingga tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai.
- 3.) Mengembangkan perekonomian masyarakat yang mandiri dan berdaya saing guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat berbasis pertanian dan pariwisata adalah memprioritaskan pembangunan berdasarkan potensi daerah melalui pemberdayaan masyarakat dengan mensinkronkan berbagai aspek pembangunan sehingga mampu mandiri dan menghasilkan produksi yang bernilai ekonomis dan mampu bersaing untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang berbasiskan kepada sektor pertanian dan pariwisata.
- 4.) Meningkatkan tata kelola sumber daya alam berdasarkan perencanaan tata ruang yang berwawasan lingkungan adalah dengan memanfaatkan seluruh potensi daerah untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek fungsi lahan dan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan.
- 5.) Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata adalah meningkatkan pemerataan pembangunan di masyarakat yang didukung dengan peningkatan dan optimalisasi infrastruktur dan fasilitas umum lainnya.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

### 3. Geografi dan Iklim Kuantan Singingi

Secara astronomis, Kuantan Singingi terletak antara 0000 -1000 Lintang Selatan dan 101002 -101055 bujur timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Kuantan Singingi memiliki batas-batas : Utara – Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan, Selatan – Provinsi Jambi, Barat – Provinsi Sumatera Barat, Timur – Kabupaten Indragiri Hulu.<sup>8</sup>

Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya adalah beberapa kecamatan dibawah Kabupaten Indragiri Hulu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kuantan Singingi. Saat ini Kabupaten Kuantan Singingi telah menjadi sebuah kabupaten definitif yang mempunyai 15 kecamatan. Jarak antara Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan :

1. Teluk Kuantan – Lubuk Jambi : 22 Km
2. Teluk Kuantan – Lubuk Ambacang : 33 Km
3. Teluk Kuantan – Kampung Baru : 10 Km

<sup>8</sup> *Geografi dan Iklim Kuantan Singingi*, dari <https://kuansing.go.id/>, diakses pada 25 April 2020 pukul 21.25 WIB.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Teluk Kuantan – Pangkalan : 70 Km
5. Teluk Kuantan – Muara Lembu : 35 Km
6. Teluk Kuantan – Koto Baru : 52 Km
7. Teluk Kuantan – Koto Sentajo : 8 Km
8. Teluk Kuantan – Benai : 10 Km
9. Teluk Kuantan – Baserah : 36 Km
10. Teluk Kuantan – Koto Rajo : 45 Km
11. Teluk Kuantan – Pangean : 30 Km
12. Teluk Kuantan – Perhentian Luas : 48 Km
13. Teluk Kuantan – Cerenti : 60 km
14. Teluk Kuantan – Inuman : 47 Km

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Kuantan Singingi memiliki batas-batas : Utara – Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan, Selatan – Provinsi Jambi, Barat – Provinsi Sumatera Barat, Timur – Kabupaten Indragiri Hulu.

Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 32,60 Celsius 36,50 Celsius dan suhu minimum berkisar antara 19,20 Celsius – 220 Celsius. Curah hujan pada 2015 berkisar antara 25,57 – 498,70 mm per tahun.

#### 4. Demografi Kuantan Singingi

Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus penduduk telah dilaksanakan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebanyak enam kali sejak Indonesia merdeka, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010.<sup>9</sup>

Di dalam sensus penduduk, pencacahan dilakukan terhadap seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia termasuk warga negara asing kecuali anggota korps diplomatik negara sahabat beserta keluarganya. Metode pengumpulan data dalam sensus dilakukan dengan wawancara antara petugas sensus dengan responden dan juga melalui *e-census*. Pencatatan penduduk menggunakan konsep usual residence, yaitu konsep di mana penduduk biasa bertempat tinggal. Bagi penduduk yang bertempat tinggal tetap dicacah di mana mereka biasa tinggal, sedangkan untuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap dicacah di tempat di mana mereka ditemukan petugas sensus pada malam ‘Hari Sensus’. Termasuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap adalah tuna wisma, awak kapal berbendera Indonesia, penghuni perahu/rumah apung, masyarakat terpencil/terasing, dan pengungsi. Bagi mereka yang mempunyai tempat tinggal tetap dan sedang bepergian ke luar wilayah lebih dari enam bulan, tidak dicacah di tempat tinggalnya, tetapi dicacah di tempat tujuannya. Untuk tahun yang tidak dilaksanakan sensus penduduk, data kependudukan diperoleh dari hasil proyeksi penduduk.

Proyeksi penduduk merupakan suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen perubahan penduduk, yaitu kelahiran,

<sup>9</sup> Demografi Kabupaten Kuantan Singingi, dari <https://kuansing.go.id/> diakses pada 25 April 2020 pukul 21.25 WIB.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kematian, dan migrasi. Proyeksi penduduk Indonesia 2010–2035 menggunakan data dasar penduduk hasil SP 2010.

Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kab. Kuantan Singingi pada tahun 2015 tercatat sebanyak 314.276 jiwa yang terdiri 161.377 jiwa laki-laki dan 152.899 jiwa perempuan. Kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah kecamatan Kuantan Tengah yaitu 47.323 jiwa dan kecamatan yang paling sedikit penduduknya adalah kecamatan Hulu Kuantan yaitu 8.678 jiwa.<sup>10</sup>

Dilihat komposisinya, penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan. Penduduk laki-laki berjumlah 161.377 jiwa dan perempuan berjumlah 152.899 jiwa. Rasio jenis kelamin 105,54. Rasio jenis kelamin yang paling tinggi terdapat di Kecamatan Pucuk Rantau 118,00 dan rasio jenis kelamin yang paling rendah terdapat di Kecamatan Pangean sebesar 99,18.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> *Geografi dan Iklim Kuantan Singingi*, dari <https://kuansing.go.id/> diakses pada 25 April 2020 pukul 21.25 WIB.

<sup>11</sup> *Sosial dan Kependudukan*, dari <https://kuansingkab.bps.go.id/> diakses pada 29 April 2020 pukul 11.30 WIB.

Tabel II.1

**Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Per (km<sup>2</sup>)  
Menurut Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015**

No	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
1.	Kuantan Mudik	564,28	23.640	41,89
2.	Hulu Kuantan	384,40	8.678	22,58
3.	Gunung Toar	165,25	13.654	82,63
4.	Pucuk Rantau	821,64	10.571	12,87
5.	Singingi	1.953,66	31.136	15,94
6.	Singingi Hilir	1.530,97	37.594	24,56
7.	Kuantan Tengah	270,74	47.323	174,79
8.	Sentajo Raya	145,70	28.215	193,95
9.	Benai	124,66	16.009	128,42
10.	Kuantan Hilir	148,77	14.843	99,77
11.	Pangean	145,32	18.462	127,04
12.	Logas Tanah Darat	380,34	20.393	53,62
13.	Kuantan Hilir Seberang	114,29	13.151	115,07
14.	Cerenti	456,00	15.125	33,17
15.	Inuman	450,01	15.482	34,40
	<i>Jumlah Total</i>	7.656,03	314.276	41,05
	2014	7.656,03	310.619	40,57
	2013	7.656,03	306.718	40,06

Sumber: Badan Pusat Statistik Kuantan Singingi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**5. Kondisi Sosial Masyarakat Kuantan Singingi**

a. Keagamaan

**Tabel II.2**  
**Rumah Ibadah Surau/Langgar/Mushollah Menurut Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016**

Kecamatan	Rumah Ibadah Surau/Langgar/Mushollah			
	2013	2014	2015	2016
Kuantan Mudik	94	94	94	64
Hulu Kuantan	37	37	37	37
Gunung Toar	51	51	51	11
Pucuk Rantau	-	-	-	31
Singingi	115	115	115	116
Singingi Hilir	80	80	80	80
Kuantan Tengah	117	117	117	80
Sentajo Raya	-	-	-	66
Benai	115	115	115	70
Kuantan Hilir	46	46	46	35
Pangean	100	100	100	100
Logas Tanah Darat	56	56	56	56
Kuantan Hilir Seberang	-	-	-	35
Cerenti	21	21	21	21
Inuman	115	115	115	64
<b>Kuantan Singingi</b>	<b>947</b>	<b>947</b>	<b>947</b>	<b>866</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kuantan Singingi.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel II.3**  
**Rumah Ibadah Wihara Menurut Kecamatan di Kabupaten**  
**Kuantan Singingi Tahun 2016**

Kecamatan	Rumah Ibadah Wihara			
	2013	2014	2015	2016
Kuantan Mudik	-	-	-	-
Hulu Kuantan	-	-	-	-
Gunung Toar	-	-	-	-
Pucuk Rantau	-	-	-	-
Singingi	-	-	-	-
Singingi Hilir	-	-	-	-
Kuantan Tengah	-	-	1	1
Sentajo Raya	-	-	-	-
Benai	-	-	-	-
Kuantan Hilir	-	-	-	-
Pangean	-	-	-	-
Logas Tanah Darat	-	-	-	-
Kuantan Hilir Seberang	-	-	-	-
Cerenti	-	-	-	-
Inuman	-	-	-	-
<b>Kuantan Singingi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kuantan Singingi*

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel II.4**  
**Rumah Ibadah Gereja Menurut Kecamatan di Kabupaten**  
**Kuantan Singingi Tahun 2016**

Kecamatan	Rumah Ibadah Gereja			
	2013	2014	2015	2016
Kuantan Mudik	-	-	-	-
Hulu Kuantan	-	-	-	-
Gunung Toar	-	-	-	-
Pucuk Rantau	-	-	-	-
Singingi	-	-	-	-
Singingi Hilir	-	-	-	-
Kuantan Tengah	-	-	1	1
Sentajo Raya	-	-	-	-
Benai	-	-	-	-
Kuantan Hilir	-	-	-	-
Pangean	-	-	-	-
Logas Tanah Darat	-	-	-	-
Kuantan Hilir Seberang	-	-	-	-
Cerenti	-	-	-	-
Inuman	-	-	-	-
<b>Kuantan Singingi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kuantan Singingi*

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel II.5**  
**Rumah Ibadah Masjid Menurut Kecamatan di Kabupaten**  
**Kuantan Singingi Tahun 2016**

Kecamatan	Rumah Ibadah Masjid			
	2013	2014	2015	2016
Kuantan Mudik	36	36	36	28
Hulu Kuantan	24	24	24	16
Gunung Toar	16	16	16	15
Pucuk Rantau	-	-	-	6
Singingi	26	26	26	26
Singingi Hilir	41	41	41	42
Kuantan Tengah	40	40	40	38
Sentajo Raya	-	-	-	28
Benai	43	43	43	24
Kuantan Hilir	26	26	26	17
Pangean	21	21	21	24
Logas Tanah Darat	23	23	23	25
Kuantan Hilir Seberang	-	-	-	10
Cerenti	17	17	17	20
Inuman	14	14	14	19
<b>Kuantan Singingi</b>	<b>317</b>	<b>317</b>	<b>317</b>	<b>338</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kuantan Singingi*

**Pendidikan**

Sektor pendidikan merupakan faktor utama dalam menunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hasil pendidikan yang telah dicapai oleh masyarakat berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dengan pemerataan pendidikan masyarakat





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khususnya di Kabupaten Kuantan Singingi diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk. Dalam pembukaan undang-undang UUD 1945 telah digariskan bahwa tujuan pembangunan nasional antara lainmencerdaskan kehidupan bangsa, hal ini dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 31 UUD 1945 bahwa “ tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”

**Tabel II.7**  
**SD, SMP,SMA dan SMK di Setiap Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020**

Kecamatan	Tahun 2020			
	Jumlah			
	SD	SMP	SMA	SMK
Kuantan Mudik	22	6	2	1
Hulu Kuantan	18	3	1	0
Gunung Toar	13	4	1	0
Pucuk Rantau	7	4	0	0
Singingi	21	7	2	0
Singingi Hilir	21	6	3	1
Kuantan Tengah	30	8	3	3
Sentajo Raya	22	7	2	1
Benai	18	5	1	1
Kuantan Hilir	13	4	1	1
Pangean	19	6	1	1
Logas Tanah Darat	17	5	1	2
Kuantan Hilir Seberang	10	2	1	0
Cerenti	12	3	1	1
Inuman	16	5	1	0
Kuantan Singingi	259	75	21	12

Sumber : Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud <sup>12</sup>

<sup>12</sup> Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud, dari <https://dapo.disdakmen.kemendikbud.go.id> diakses pada Minggu 12 Juli 2020 Pukul 17.00 WIB.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Ekonomi

Kondisi perekonomian daerah secara makro di Kabupaten Kuantan Singingi dari tahun 2013-2017 menunjukkan pergerakan ke arah yang membaik. Hal ini dapat ditunjukkan dari angka Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) dan Atas Dasar Harga yang berlaku (PDRB ADHB) yang mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kuantan Singingi juga menunjukkan prospek yang baik. Pertumbuhan ekonom selama periode 2006-2010 rata-rata mendekati angka 8 persen dan ini merupakan angka yang cukup baik bagi perkembangan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat tersebut terutama ditopang oleh sektor pertambangan dan penggalian yang mampu tumbuh rata-rata 18,17 persen setiap tahunnya.<sup>13</sup>

<sup>13</sup> RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011-2016 hlm. 43



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel II.11**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2006-2010**

No	Sektor	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata
1	Pertanian	5,24	6,13	6,08	5,70	6,46	5,52
2	Pertambangan dan penggalan	42,44	21,02	18,52	4,62	4,24	18,17
3	Industri dan Pengolahan	5,68	11,47	8,29	7,11	7,89	8,21
4	Listrik, gas dan air bersih	4,56	7,89	6,73	5,67	6,53	6,26
5	Konstruksi	8,68	10,25	8,72	8,81	8,85	9,06
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	8,45	7,70	7,15	7,75	7,87	7,78
7	Pengangkutan dan Komunikasi	8,89	9,77	8,03	8,22	8,36	8,65
8	Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan	6,38	16,89	13,25	14,61	15,57	13,34
9	Jasa-Jasa	9,23	9,87	9,20	9,63	9,22	9,23
<b>Kuantan Singingi</b>		<b>8,83</b>	<b>8,91</b>	<b>8,26</b>	<b>6,90</b>	<b>7,03</b>	<b>7,99</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kuantan Singingi

#### Sosial Budaya

Kabupaten Kuantan Singingi kaya akan aktifitas seni dan budaya yang masih dipertahankan dan digelar pada kegiatan-kegiatan tertentu. Berbagai aktivitas tumbuh dan dilestarikan dikalangan masyarakatnya, seperti: sastra, seni musik dan seni tari. Selain itu ada beberapa kerajinan yang dapat



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijadikan buah tangan seperti pahatan, batik tulis, suji dan sebagainya. Selain itu juga terdapat beberapa upacara tradisional seperti Upacara Pernikahan dan Upacara Bulian.

Kemudian, terdapat juga beberapa budaya kebanggaan masyarakat Kuantan diantaranya:

1. Perahu Baganduang adalah atraksi budaya dan perayaan masyarakat kuantan yang ditandai dengan parade sampan tradisional yang dihiasi dengan ornamen dan warna-warna yang menarik.
2. Randai adalah kesenian khas Minangkabau, yakni perpaduan antara seni bela diri dengan tarian yang diiringi musik tradisional. Biasanya tradisi ini di gelar semalaman dan menceritakan legenda daerah tersebut.
3. Pacu Jalur merupakan Budaya kebanggan masyarakat Kuantan Singingi yang telah dikenal luas baik di nasional maupun internasional. Tak heran jika event pacu jalur telah ditetapkan sebagai pariwisata terpopuler dan meraih penghargaan Anugerah Pesona Indonesia tahun 2018. Pacu jalur merupakan perpacuan 2 buah jalur yang diisi oleh 50-60 atlet dayung dari setiap desa yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Selain sebagai event tahunan, Pacu jalur juga menjadi ajang silaturahmi bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

## **B. Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan ( BAPPEDALITBANG) Kuantan Singingi**

### **1. Sejarah BAPPEDALITBANG Kuantan Singingi**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan atau disingkat BAPPEDALITBANG merupakan salah satu lembaga teknis di daerah kabupaten kuantan singingi yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.<sup>14</sup>

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bappedalitbang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut;

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- b. Pelaksaaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- e. Pelaksanaan administrasi Badan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsinya.

<sup>14</sup> *Profil Bappedalitbang Kuantan Singingi*, dari <https://bappedalitbang.kuansing.go.id//> diakses pada 29 April 2020 pukul 14.00 WIB.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## 2. Struktur organisasi BAPPEDALITBANG Kuantan Singingi

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Kepala Bappedalitbang
- b. Sekretaris
  - 1.) Kasubbag Program
  - 2.) Kasubbag Keuangan
  - 3.) Kasubbag Umum
- c. Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
  - 1.) Kasubbid Perencanaan dan Pendanaan
  - 2.) Kasubbid Pengendalian dan Evaluasi
  - 3.) Kasubbid Data dan Pelaporan
- d. Kabid pemerintahan dan pembangunan Manusia
  - 1.) Kasubbid Pemerintahan, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
  - 2.) Kasubbid Pendidikan, Kesehatan, Pengawasan dan Kepegawaian
  - 3.) Kasubbid Kependudukan, Pariwisata, Budaya, Arsip dan Kesbangpol
- e. Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan
  - 1.) Kasubbid Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan
  - 2.) Kasubbid Pertanian, Koperasi, Perdagangan, Industri dan Perhubungan

<sup>15</sup> Susunan Organisasi Bappedalitbang Kuantan Singingi, dari <https://bappedalitbang.kuansing.go.id/> diakses pada 29 April 2020 pukul 14.00 WIB.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

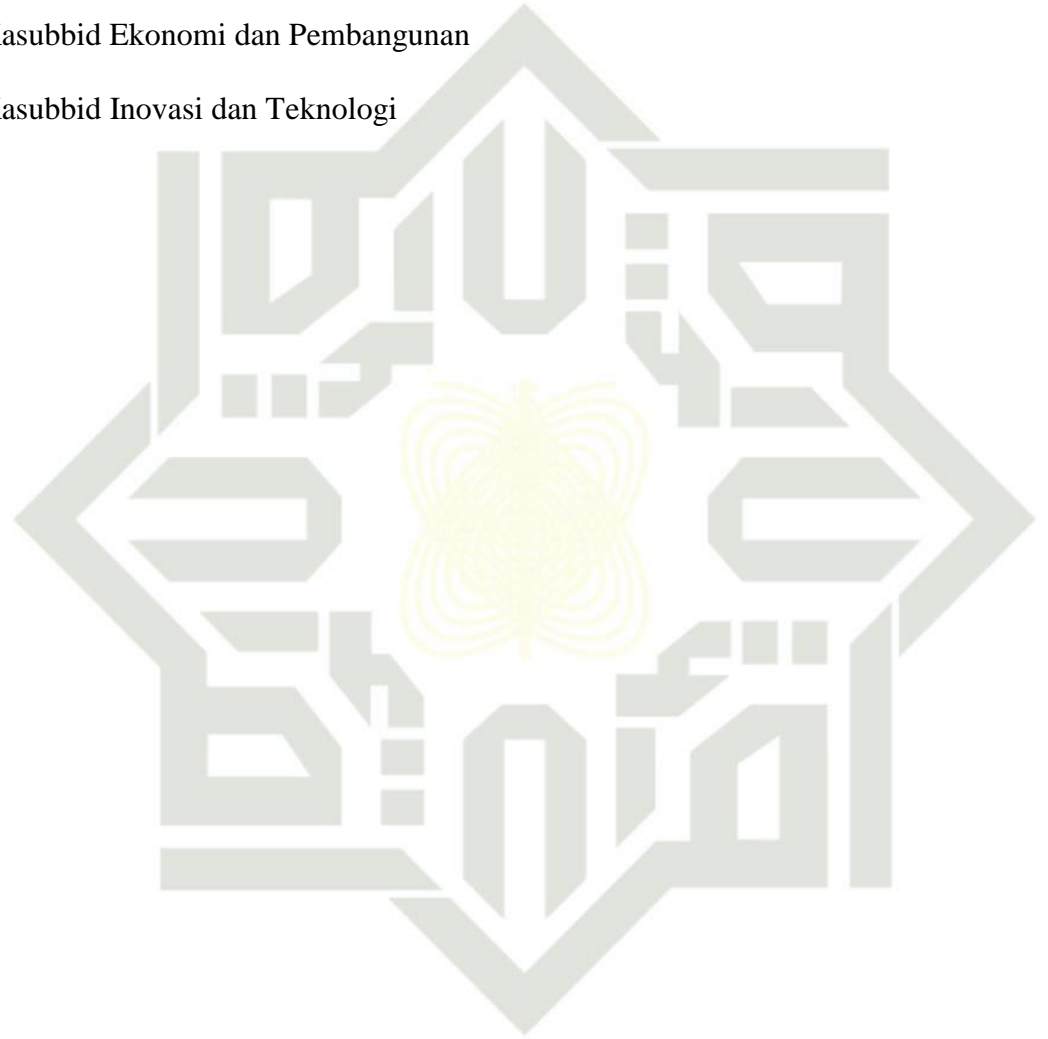
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 3.) Kasubbid Lingkungan Hidup, Kominfo, Penanaman Modal, Aset dan Pendapatan

f. Kabid Penelitian dan Pengembangan

- 1.) Kasubbid Sosial dan Pemerintahan
- 2.) Kasubbid Ekonomi dan Pembangunan
- 3.) Kasubbid Inovasi dan Teknologi



UIN SUSKA RIAU

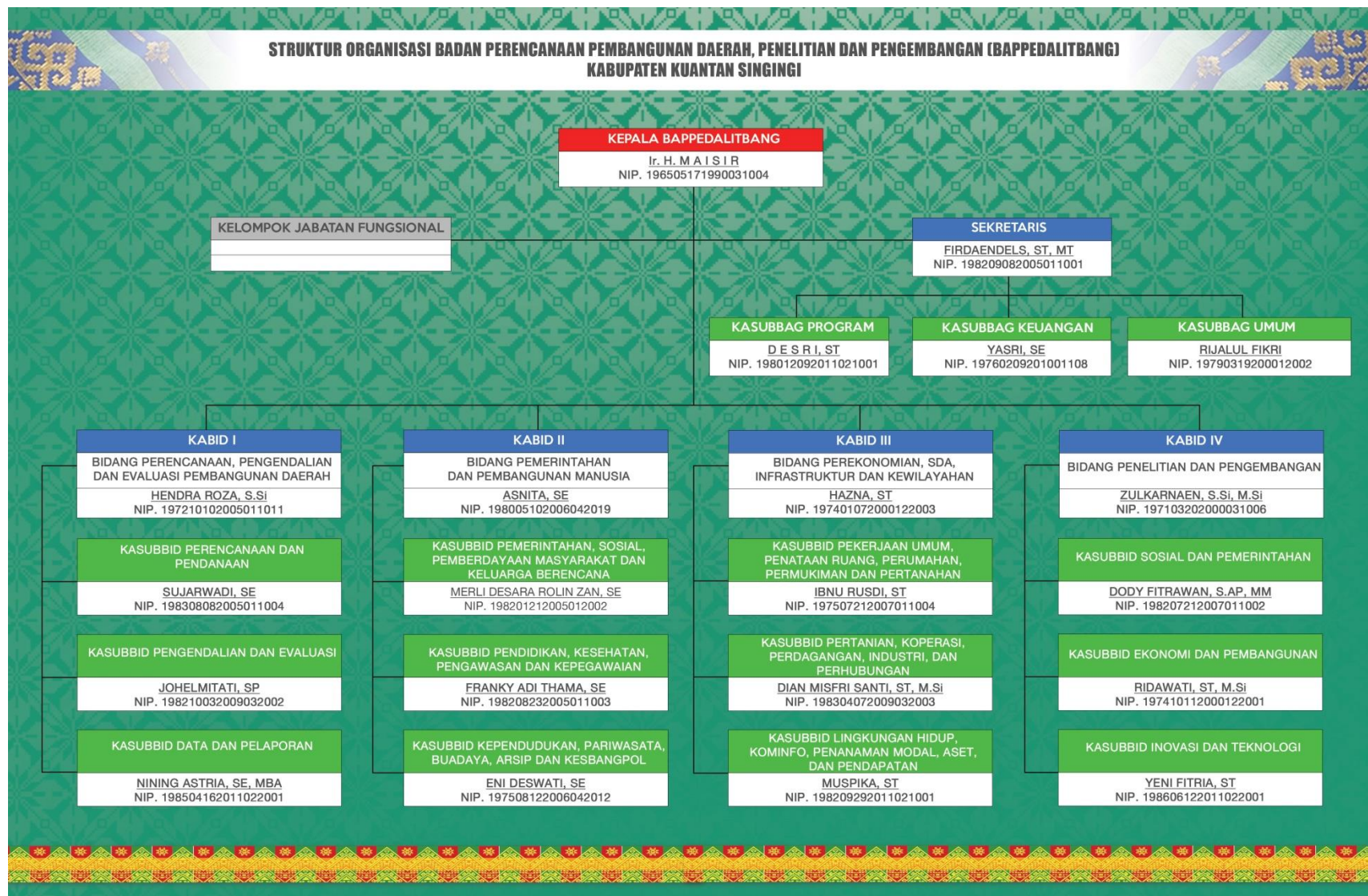
© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar II.2**  
**Bagan Struktur Organisasi BAPPEDALITBANG Kabupaten Kuantan Singingi**





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINJAUAN TEORITIS TENTANG KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM UPAYA PEMANFAATAN FASILITAS PEMBANGUNAN 3 PILAR PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

### A. Konsep Kebijakan

#### Pengertian Kebijakan

Istilah kebijakan seringkali penggunaannya saling dipertukarkan dengan istilah tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan-rancangan besar <sup>1</sup>

Kebijakan pada intinya adalah sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman ini boleh jadi amat sederhana atau kompleks, bersifat umum maupun khusus. Sejalan dengan makna kebijakan yang dikemukakan oleh United Nation tersebut di atas, Fredrick (dalam Islamy, 1998) memberikan pengertian kebijakan, yaitu serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.<sup>2</sup> Dalam konteks ini dapat dimengerti, bahwa kebijakan tidak akan sukses, jika dalam pelaksanaannya tidak ada kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan. Seringkali ada anggapan setelah kebijakan disahkan oleh pihak yang

<sup>1</sup> Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, (Jakarta:PT Bumi Aksara,1997) hlm. 127

<sup>2</sup> Sholih Muadi, *Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik* , Jurnal (Review Politik:2016) Vol.06. No. 02 hlm. 197



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berwenang dengan sendirinya kebijakan itu akan dilaksanakan, dan hasil-hasilnya pun akan mendekati seperti yang diharapkan oleh pembuat kebijakan tersebut. Dalam proses kebijakan publik yang akan diterapkan, melalui proses/tahapan yang cukup panjang. Thomas R. Dye (2001) menguraikan proses kebijakan publik dalam beberapa tahapan, di antaranya (Parson, 2005: 154):<sup>3</sup>

1. Identifikasi masalah kebijakan
2. Penyusunan agenda
3. Perumusan kebijakan
4. Pengesahan kebijakan
5. Implementasi kebijakan
6. Evaluasi kebijakan.

Kebijakan dalam bahasa Belanda biasa ditulis “*beleidsregel*”, berbeda dengan keputusan yang dalam bahasa Belanda ditulis “*beschikking*”, biasa juga dikatakan dengan ketetapan. Keputusan lahir ketika pemerintah sebagai pelaksana undang-undang, karena dengan adanya undang-undang, ia mendapat legalitas dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat eksekutif. Sedangkan kebijakan merupakan tindakan pemerintah yang lahir bukan dari undang-undang yang memberi legitimasi terhadap pejabat eksekutif tersebut untuk mengambil tindakan dalam bidang administrasi negara.<sup>4</sup> Jadi, di luar konteks perundang-undangan, seorang pejabat tetap diberikan kewenangan lagi

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 199

<sup>4</sup> Damang Averroes, *Beda Keputusan dan Kebijakan*, dari <https://negarahukum.com/beda-keputusan-dan-kebijakan.html>, diakses pada 11 Juli 2020 pukul 21.20 WIB.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat undang-undang. Terlepas dari apa yang diatur dalam undang-undang tersebut. Dengan pertimbangan yang matang, misalnya demi kepentingan yang mendesak dan mengutamakan kepentingan umum.

Sederhananya kebijakan sepadan dengan kekuasaan diskresi yang diberikan kepada pejabat (*discretionary of power*). Sehingga dalam Hukum Administrasi Negara, oleh sebagian yuris seperti Markus Lukman mengatakan kebijakan sebagai bayangan atau pantulan dari undang-undang dan keputusan. Kebijakan bisa dikatakan semi undang-undang, semi keputusan. Pemerintah tetap masih dalam kendali undang-undang atas kebijakan yang dikeluarkannya. Melalui uji kelayakan dan kepastian berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).<sup>5</sup>

### 2. Kebijakan Pemimpin dalam Islam

Islam menetapkan tujuan dan tugas utama pemimpin adalah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya serta melaksanakan perintah-perintah-Nya. Ibnu Taimyah mengungkapkan bahwa kewajiban seorang pemimpin yang telah ditunjuk dipandang dari segi agama dan dari segi ibadah adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pendekatan diri kepada Allah adalah dengan menaati peraturan-peraturan-Nya dan Rasul-Nya. Namun hal itu lebih sering disalah gunakan oleh orang-orang yang ingin mencapai kedudukan dan harta.

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang PTUN

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Islam pemimpin dan kepemimpinan adalah fitrah kemanusiaan, sejak manusia ada, maka pada saat itu pemimpin dan kepemimpinan juga telah ada. Pemimpin dan kepemimpinan adalah rekognisi (pengakuan), baik pengakuan formal maupun informal, baik sifatnya tunggal (diri sendiri) maupun jamak (banyak). Pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan adalah sosok yang mampu menerjemahkan nilai-nilai spiritual dan motivasi dalam sebuah sistem formal maupun informal.<sup>6</sup> Seorang pemimpin harus bersikap dan berperilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar Negara maupun Pancasila sebagai idiologi Negara merupakan lima poin yang dijadikan dasar Negara dan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia, baik penegakan hukum, beragama, dan tolong-menolong antar warga negara.

Persatuan Indonesia merupakan sila ke-tiga Pancasila yang menjadi dasar Negara Indonesia. Persatuan Indonesia ini ditunjukkan dalam rangka mewujudkan sila ke-lima yakni keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila ke-lima ini terdapat makna Pancasila bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kemakmuran dan kesejahteraan, saling memberikan perlindungan kepada yang lemah, seluruh kekayaan Indonesia di pergunakan dengan baik untuk kebahagiaan dan kepentingan bersama.<sup>7</sup> Namun untuk menjamin sila ke-tiga tersebut bisa terlaksana dengan baik, pengalaman sila ke-

<sup>6</sup> Veithzal Rivai, Arviyan Arivin, *Islamic Leadership*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009) hlm.225

<sup>7</sup> Artis, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, (Pekanbaru: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014), hlm.8



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

empat yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan menjadi teramat sangat penting. Hal tersebut harus didorong dengan pola pikir yang berorientasi kerakyatan, dimana nilai-nilai dalam pancasila dibuat dari nilai moral yang hidup di masyarakat, diciptakan oleh masyarakat dan tujuan untuk masyarakat itu sendiri. Pola pikir seperti itulah yang di harapkan dalam kesejahteraan sosial kemasyarakatan di Indonesia.

### B. Sejarah Pemerintahan Daerah dalam Ketatanegaraan Islam

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>8</sup>

Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati dan untuk kota disebut walikota. Kepala daerah dibantu oleh seorang wakil kepala daerah, untuk daerah provinsi disebut wakil gubernur, di daerah kabupaten disebut wakil bupati dan di daerah kota disebut wakil walikota.

Dalam Ketatanegaraan Islam juga telah mengenal istilah pemerintahan daerah, bahkan sejak masa kepemimpinan Rasulullah SAW. Untuk Pemerintahan daerah, beliau mengangkat beberapa sahabat sebagai gubernur atau hakim. Di

<sup>8</sup> Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara sahabat yang diangkat adalah Mu'adz ibn Jabal sebagai hakim di Yaman. Beliau juga mengelola zakat, pajak dan *ghanimah* untuk kesejahteraan penduduk.

Pada masa pemerintahan Abu Bakar, untuk membantu tugas-tugas daerah Abu Bakar juga meneruskan pola Nabi SAW dengan mengangkat para gubernur sebagai kepala pemerintahan. Mereka adalah:<sup>9</sup>

1. 'Utab ibn Asid untuk Mekkah;
2. 'Usman ibn Abi al- 'Ash untuk Tha'if;
3. Muhajir ibn Umaiyyah untuk Shan'a;
4. Zaid ibn Labid untuk Hadramaut;
5. Ya'la ibn Umaiyyah untuk Khaulan;
6. 'Ila ibn Tsur al- Hadrami untuk Zabid dan Rima;
7. Mu'adz ibn Jabal untuk Janad;
8. 'Abdullah ibn Tsur untuk Jarsy;

Berlanjut hingga pemerintahan 'Umar bin Khattab, untuk pemerintahan daerah, 'Umar mengangkat gubernur yang mempunyai otonomi yang luas. Mereka menjalankan tugas dan fungsi sebagai pembantu khalifah. Sebagaimana halnya peradilan di pusat yang terpisah dari kekuasaan eksekutif, di beberapa daerah juga diangkat beberapa hakim yang bebas dari pengaruh-pengaruh gubernur dan khalifah. Mereka melaksanakan peradilan yang bebas dan mandiri.<sup>10</sup>

Khalifa Usman bin 'Affan juga menerapkan prinsip pemerintahan daerah, hanya saja pengangkatan pejabat (gubernur) berdasarkan prinsip kekeluargaan

<sup>9</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 59

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 66



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang pada akhirnya melahirkan gerakan oposisi.<sup>11</sup> Akhirnya pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, hal pertama yang dilakukan saat menjabat menjadi khalifah adalah memberhentikan gubernur-gubernur yang diangkat 'Usman sebelumnya dan menarik kembali tanah yang dibagi-bagi oleh 'Usman kepada kerabatnya.<sup>12</sup>

Kemudian, ketatanegaraan pada masa Umayyah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Mu'awiyah menggantikan sistem pemerintahan yang bercorak syura dengan pemilihan kepala negara secara penunjukan. Ini mengawali corak monarki dalam pemerintahan Islam yang berlangsung bahkan hingga awal abad ke-20M. Dalam pemerintahan daerah, wilayah kekuasaan Bani Umayyah dibagi menjadi lima provinsi besar, yaitu:<sup>13</sup>

1. Hijaz, Yaman dan Arabia
2. Mesir bagian Utara dan Selatan
3. Irak dan Persia
4. Mesopotamia, Armenia dan Azarbaijan
5. Afrika Utara, Spanyol, Perancis bagian Selatan, Sisilia, dan Sardinia.

Tiap-tiap provinsi dipimpin oleh seorang gubernur yang bertugas menjalankan administrasi politik dan militer untuk wilayah masing-masing. Mereka langsung diangkat oleh Khalifah dan bertanggung jawab kepadanya.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 82

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 86

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 92



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena sifat Bani Umayyah adalah sentralistik, kepala daerah hanya melaksanakan kebijaksanaan yang digariskan dari pusat.<sup>14</sup>

Pada masa Kekhalifahan Bani Abbasiyah, diangkatlah seorang kepala daerah (amir) sebagai pembantu tugas mereka. Ketika mereka masih kuat, sistem pemerintahan ini bersifat sentralistik. Semua kepala daerah bertanggung jawab kepada khalifah yang diwakili oleh wazir. Namun setelah kekuasaan pusat lemah, masing-masing amir berkuasa penuh mengatur pemerintahannya sendiri. Hingga pada akhirnya, banyak daerah yang melepaskan diri dari kekuasaan pusat. Pada masa tersebut timbullah dinasti-dinasti kecil, baik di Barat maupun Timur Baghdad.<sup>15</sup>

Pada masa al-Saffah daerah kekuasaan Bani Abbas dibagi menjadi dua belas provinsi. Pemerintah daerah (amir) dibagi tiga keamiran yaitu:<sup>16</sup>

1. *Imarah Istikfaa*

Bertugas antara lain mengatur dan menggaji tentara daerah, memungut pajak, menjadi imam, dan menegakkan pelaksanaan hukum. Mereka adalah pejabat eksekutif daerah (gubernur).

2. *Imarah Istila*

Bertugas dalam masalah ketertiban umum, yaitu semacam kepala kepolisian daerah (polda).

3. *Imarah Khashshah*

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 94

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 103

<sup>16</sup> *Ibid*

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bertugas menanganimasalah ketentaraan. Dengan kata lain, jabatan ini kira-kira sama dengan panglima daerah militer (pangdam).

Sedangkan pemerintahan daerah pada masa Dinasti Turki Usmani sejak periode awal Sultan Usmani dibantu oleh dua pejabat penting daerah; *Bey* dan *Qadhi*. *Bey* adalah gubernur yang berasal dari kelas militer dan menjadi wakil sultan dalam pelaksanaan kekuasaan eksekutif. Sementara *Qadhi* mewakili sultan dalam kekuasaan hukum. *Bey* mendapatkan persetujuan dari *Qadhi* dalam keputusan dan pelaksanaan Qanun dan Syariat. *Qadhi* bebas dari pengaruh *Bey*. *Qadhi* memperoleh kekuasaan langsung dari sultan.<sup>17</sup>

Di samping *Bey* dan *Qadhi*, pemerintah daerah juga dipegang oleh *hazine defterdar* yang mewakili sultan dalam masalah-masalah keuangan dan finansial. Ia juga memiliki kekuasaan langsung dari sultan dan dapat berkomunikasi langsung dengan pusat kerajaan. Di samping mengurus masalah keuangan *hazine defterdar* juga bisa mengadukan *Bey* atau pejabat daerah lainnya ke pusat untuk di proses secara hukum.<sup>18</sup>

### C. Konsep Otonomi Daerah di Indonesia dan dalam Perspektif Islam

Wujud pemerintahan daerah dalam era reformasi seperti yang tercantum dalam UU No. 22/1999 adalah otonomi. Wujud pemerintahan yang demikian adalah kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan ada pada daerah. Sebab itu, ada dua tantangan yang segera timbul, yang perlu dijawab oleh daerah-daerah: Pertama, bagaimana bentuk organisasi pemerintahan yang

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 113

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 114



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

otonom, kedua bagaimana mendapatkan dana untuk membiayai pemerintahan tersebut? Hakekat dari bentuk pemerintahan daerah otonom, seharusnya tergantung pada masing-masing daerah. Artinya, sekalipun dalam UU No.22/1999 tidak disebutkan adanya keragaman bentuk dari perangkat pemerintahan, namun daerah-daerah sebenarnya mempunyai kewenangan untuk membuat variasi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Otonomi daerah dalam menggali maknanya sejak dikenalkannya konsep negara atau republik dari masa Yunani, kata otonomi atau autonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu auto yang berarti sendiri, dan nomous yang berarti hukum atau peraturan kalau ditafsir secara harfiah otonomi adalah peraturan sendiri atau mengatur diri sendiri. Dengan pengertian dasar tersebut maka rumusan otonom daerah dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah mengalami perubahan yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sudah tepat. Berdasarkan kenyataan ini maka menghilangkan keraguan-raguan dan menghilangkan multitafsir tentang otonomi daerah terutama masa depan, walau secara filosofis sebenarnya tidak ada yang baru, tetapi varian dan pemahaman terus berkembang sebagai dinamika kehidupan, ada baiknya muatan otonomi daerah yang dirumuskan dalam Pasal 18, 18A, 18B Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen Tahun 2000 dicantumkan sebagai landasan konkrit dan utuh serta satu-satunya sumber konstitusional pemerintahan daerah.<sup>19</sup>

Di Indonesia pemimpin atau kepala negaranya dipegang oleh seorang Presiden. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

<sup>19</sup> Said Zainal Abidin, *Sistem Pengelolaan Pemerintahan Daerah dalam Era Reformasi*, (Jajalah Perencanaan Pembangunan\Edisi 24 Th 2001), hlm. 4



1945 Pasal 4 bahwa Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan yang dalam melakukan kewajibannya sebagai Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden.<sup>20</sup> Wilayah negara kesatuan republik indonesia dibagi dalam daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota yang bersifat otonom. Menurut Undang-Undang No.22 Tahun 1999 pasal 4 ayat (1), menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.<sup>21</sup>

Daerah provinsi tidak membawahkan daerah kabupaten dan daerah kota, tetapi dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan terdapat hubungan koordinasi, kerja sama, dan/atau kemitraan dengan daerah kabupaten dan daerah kota dalam kedudukan masing-masing sebagai daerah otonom.<sup>22</sup> Bupati dan perangkat daerahnya adalah pelaksana peraturan perundang-undangan dalam lingkup kabupaten yaitu peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Dalam arti sempit, bupati dan perangkatnya hanya tunduk dan melaksanakan kebijakan daerah yang digariskan dalam peraturan daerah. Namun dalam prakteknya karena kabupaten adalah subsistem dari negara, maka bupati dan aparatnya juga bertindak dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang dibuat DPR, Presiden, Menteri dan Gubernur.

<sup>20</sup> Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>21</sup> Dian Bakti S. *Pemberhentian Kepala Daerah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011) hlm. 127

<sup>22</sup> C.T.S Kansil & Christine S.T Kansil. *Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika 2004) hlm. 82

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prinsip demokrasi yang dipegang teguh oleh negara Islam, tergambar juga dalam susunan pemerintahan daerah khususnya, dan bentuk negara umumnya. Sifat-sifat otonomi dan pemerintahan berdiri sendiri, berlaku sepenuhnya dari pusat sampai ke daerah-daerah terjauh. Pemerintah daerah dalam negara Islam, dinamakan wilayah, dan jabatan yang memimpin pemerintahan itu dinamakan al-*Amār*. Oleh sebab itu, kata sering wilayah dipakai pada luas daerah, misalnya dalam istilah sekarang Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa. Sedangkan al-*Amār*h digunakan untuk pejabat seperti Gubernur untuk wilayah Provinsi, walikota untuk kotapraja (kotamadya), bupati untuk Kabupaten.<sup>23</sup> Dalam urusan jabatan ini, digunakan beberapa nama yang menggambarkan hak-hak dan tugas yang dimiliki dan dipikul oleh seorang kepala daerah yang memimpin wilayahnya. Adapun istilah-istilahnya yaitu:

1. “*Al-‘Āmil*” yang hampir dapat diartikan “pegawai” (bekerja untuk daerah),
2. “*Al-Walī*” yang hampir dapat diartikan “kepala daerah” (memiliki tanggungjawab sendiri),
3. “*Al-Amīr*” yang bisa diartikan “kepala daerah otonomi” (memiliki berdiri sendiri), dan
4. “*Al-Sultān*” yang boleh diartikan “kepala negara bagian” (wilayahnya merupakan negara dalam lingkungan Negara Islam).<sup>26</sup> Dari beberapa istilah tersebut, berdirilah khilafah sebagai kepala negara Islam, yang kekuasaannya meliputi seluruh wilayah negara.

<sup>23</sup> Zainal Abidin Ahmad, *Membangun Negara Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Iqra, 2001), h.178.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Inilah gambaran ringkas tentang istilah yang dipakai negara Islam dalam menyusun organisasi pemerintahan daerah. Pemakaian beberapa sebutan kepala daerah dalam tingkatan yang bermacam, menggambarkan isi otonomi dan hak demokrasi, status pemerintah daerah. Tingkatan-tingkatan jabatan, dari al-‘amīl kepada al-walī, al-amīr, dan al-Sulātn, seperti tingkat lurah, Bupati, dan Gubernur yang memiliki wilayah kekuasaannya, tetapi tingkatan-tingkatannya berkaitan erat pada isi otonomi yang diberikan. Misalnya seorang al-‘amīl bisa diberi tugas menjadi pembesar untuk suatu daerah yang luas wilayahnya seperti desa (kepala desa), dan bisa juga memimpin suatu daerah yang luas wilayahnya sama dengan kabupaten atau provinsi, tetapi hak dan tugasnya hanya sebagai pegawai yang menjalankan perintah dari atasan. Al-Walī juga bisa menjadi kepala suatu daerah, desa, kabupaten atau provinsi, tetapi dengan hak dan tugas yang lebih besar, yaitu memiliki hak otonomi untuk daerahnya. Begitu juga dengan al-amīr, yang mempunyai hak otonomi lebih luas, dan al-Sulātn yang otonominya termasuk memimpin negara bagian.<sup>24</sup> Adapun wilayah negara Islam dengan pimpinan pemerintahannya, “alimarāh”, pada umumnya terbagi menjadi dua bagian: yaitu:

1. *Al- Wilāyah al- Khāṣah* *Al- Wilāyah al- Khāṣah* dengan pimpinan pemerintahannya “al-imarāh”, yaitu daerah administratif yang dipimpin oleh seseorang pembesar yang dinamakan “al- ‘āmīl”. Wilayah ini tidak mempunyai hak-hak otonomi, tidak mempunyai ūlī al-amri untuk daerahnya, dan tidak pula berhak mengatur pemerintahan sendiri, baik melalui organisasi maupun formasinya. Terhadap pimpinan wilayah

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 178



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

administratif, negara Islam selamanya memakai sistem “kollegial”, artinya pembesar yang memimpin harus terdiri dari beberapa orang yang satu sama lain harus bekerja sama, dan mereka bersama-sama bertanggungjawab langsung kepada pemerintah pusat. Dengan demikian, prinsip musyawarah tetap dilaksanakan walaupun prinsip “ūli al-amri” tidak dapat diwujudkan karena tidak ada dewan-dewan perwakilan.

2. *Al- Wilāyah al-‘Āmmah Al- Wilāyah al-‘āmmah* dengan pimpinan pemerintahannya yang dinamakan “al-imārah al-‘āmmah” yaitu pemerintahan daerah otonomi yang berhak mengatur sendiri. Di daerah-daerah ini terdapat pemerintahan yang lengkap, prinsip musyawarah dilaksanakan sebaik-baiknya, dan ada ūli al-amri yang menjadi isi demokrasi Islam.

Di samping kepala daerah ada perwakilan yang mengatur dan mengurus urusan daerahnya berhak mengeluarkan aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan umum dari pusat. Kepala daerah yang memimpin pemerintahan daerah ini bisa disebut “*al-walī*”, bisa disebut juga “*al-amīr*”, dan bisa juga “*al-sultān*”, sesuai besar kecilnya hak-hak otonomi yang dimiliki oleh daerah tersebut.<sup>25</sup>

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 179

#### D. Konsep Pemanfaatan Fasilitas Pembangunan

##### 1. Pengertian Pemanfaatan

Pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti guna atau bisa diartikan berfaedah. Pemanfaatan memiliki makna proses, cara, atau perbuatan memanfaatkan.<sup>26</sup> Pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan sesuatu yang ada menjadi bermanfaat. Pengertian pemanfaatan dalam penelitian ini adalah kondisi dimana suatu benda (fasilitas) dapat dirasakan, digunakan atau diambil manfaatnya.

##### 2. Pengertian Fasilitas Pembangunan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Fasilitas adalah segala sesuatu yang berbentuk benda maupun uang yang dapat memudahkan serta memperlancar pelaksanaan suatu usaha tertentu. Dalam kata lain Fasilitas disebut juga dengan prasarana yang berarti segala sesuatu yang merupakan utama terselenggaranya suatu proses.

Sedangkan pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan budaya. Portes (1976) mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya.

<sup>26</sup> Peter Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 2002). Hlm. 928

E.

## Konsep Pengelolaan Aset Menurut Islam

Islam menempatkan manusia pada posisi khalifah, di mana manusia menegmban amanat untuk memakmurkan kehidupan dunia. Tugas ini hanya diberikan kepada manusia sebagai makhluk yang dilebihkan dari makhluk lainnya. Amanat ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah swt di hari akhirat kelak. Manusia harus mengarahkan pengelolaan segala yang ada di bumi kepada kemanfaatan dan menghindari segala bentuk pembaziran dan menghindari kerusakan lingkungan. Islam menghendaki itu semua guna mencapai tujuan utama syariat yakni mewujudkan kesejahteraan manusia. Kesejahteraan tersebut mencakup kesejahteraan keimanan, kehidupan, akal, keturunan dan harta benda mereka.<sup>27</sup>

Manajemen harta atau lebih dikenal dengan manajemen *asset* merupakan suatu kegiatan pengelolaan harta mulai dari proses mencari harta, membelanjakan harta dan menyisihkan harta. Aset atau harta dalam pandangan islam merupakan kepemilikan sementara yang diamanahkan Tuhan kepada manusia. Pada dasarnya manajemen aset merupakan sistem pengelolaan harta yang terkait langsung dengan manajemen modal kerja dan manajemen investasi (Kasmir, 2010:6).

Lahirnya konsep manajemen aset dalam Islam dilandasi oleh hadits yang diriwayatkan Ahmad (Ath-Tharsyah,2003:47) berikut ini:

نَعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ

“Sebaik-baik harta adalah harta yang ada pada orang shaleh.”

<sup>27</sup> Ridwan Nurdin, *Konsep Dan Teori Manajemen Aset Dalam Islam*, Jurnal (Media Sari'ah:2017) Vol.19.No 2. hlm.40.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadist di atas mempunyai maksud beragam, di antaranya harta yang baik merupakan harta yang dimanfaatkan. Hadits tersebut juga dapat diartikan harta yang baik ialah harta yang berada ditangan orang-orang shaleh. Indikasi dari dua maksud tersebut adalah pengelolaan harta dicerminkan dari keshalehan seseorang, di mana harta yang dikelola dengan niat, cara dan tujuan untuk mengoptimalkan ibadahnya kepada Allah akan sangat berbeda dengan harta yang dikelola sebagai pemuas kebutuhan.<sup>28</sup> Nilai moral keshalehan inilah yang melahirkan konsep manajemen aset dalam Islam, yakni pengelolaan harta dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan pemiliknya dalam rangka beribadah kepada Allah swt. Berdasarkan nilai keshalehan di atas memberikan orientasi dalam manajemen aset yaitu:

- a.) Pemanfaatan harta untuk kelangsungan hidup diri dan keluarganya sebagai kewajiban bagian dari fitrah manusia;
- b.) Pemanfaatan harta di luar dari kewajibannya, yakni untuk memperbanyak amal shaleh dalam rangka mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah swt.

### F. Fiqh Siyasah

#### 1. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata fiqh berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam”. Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm.45.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasti (*qath'i*). Fiqh merupakan ilmu tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*). Menurut istilah, fiqh adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syari'at yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (*tafsil*).<sup>29</sup> Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukumhukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh disebut juga dengan hukum Islam, karena fiqh bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri. Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia.

Di samping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya, fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah). Aspek muamalah ini pun dapat dibagi lagi menjadi jinayah (pidana), munakahat (perkawinan), mawaris (waris), murafa'at (hukum acara), siyasah (politik/ketatanegaraan), dan *al-ahkam al-dualiyah* (hubungan internasional).<sup>30</sup> Kata "siyasah" berasal dari kata *sasa-yasusu-siyasatan* yang artinya "mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan". Oleh karena itu, berdasarkan pengertian harfiah, kata *as-siyasah*

<sup>29</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 2-3.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 3.

berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan, dan arti-arti lainnya.<sup>31</sup>

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.” Sementara Louis Ma’ruf memberikan batasan siyasah adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.” Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan siyasah “mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.” Defenisi yang bernuansa religius dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jawziyah. Menurutnya, siyasah adalah “suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT.<sup>32</sup> Dengan demikian bahwa pengertian fiqh siyasah adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Mujar Ibn Syarif dalam bukunya “Fiqh Siyasah” mendefenisikannya sebagai ilmu yang mempelajari hal ihwal atau seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari’at untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Bahwa fiqh

<sup>31</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 25-26.

<sup>32</sup> Muhammad Iqbal, *Op.cit.* hlm. 4.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



siyasah dalam arti populer adalah ilmu tata negara, dalam ilmu agama Islam dikategorikan ke dalam pranata sosial Islam.<sup>33</sup>

## 2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Berkenan dengan luasnya objek kajian Fiqh Siyasah, maka dalam tahap perkembangan nya dikenal beberapa perbidangan Fiqh Siyasah. Hasbi Ash-Shiddieqy sebagai contoh membaginya dalam delapan bidang yaitu:

1. Siyasah Dusturiyah Syar'iyah
2. Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah
3. Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah
4. Siyasah Maliyah Syar'iyah
5. Siyasah Idariyah Syar'iyah
6. Siyasah Dawliyah
7. Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyah
8. Siyasah Harbiyah Syar'iyah

Berdasarkan perbedaan para ulama, pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok, yaitu:

- a.) Siyasah Dusturiyah disebut juga politik perundang-undangan. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (tasyri'iyah) oleh lembaga

<sup>33</sup> Mujaar Ibn Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm.10.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

legislatif, peradilan (qadha'iyah) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (idariyyah) oleh birokrasi atau eksekutif.

b.) Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyyah, disebut juga politik luar negeri.

Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukanwarga negara. Di bagian ini ada politik masalah peperangan (siyasah harbiyah), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.

c.) Siyasah Maliyah, disebut juga politik keuangan dan moneter. Membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.<sup>34</sup>

#### 3. Sumber Kajian Fiqh Siyasah

Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu fiqh, fiqh siyasah mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Secara garis besar, sumber fiqh siyasah dapat dibagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Hathiyyah al-Nabrawi membagi sumber-sumber fiqh siyasah kepada tiga bagian, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, sumber-sumber tertulis selain Al-Qur'an dan Sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum Muslimin terdahulu.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Muhammad Iqbal, *Opcit.*, hlm.15

<sup>35</sup> Ibid, hlm. 16.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain sumber Al-Qur'an dan Sunnah, Ahmad Sukardja mengungkapkan sumber kajian fiqh siyasah berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan para pakar politik, 'Urf atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya. Metode kajian fiqh siyasah juga tidak jauh berbeda dengan metode yang digunakan dalam mempelajari fiqh umumnya, yaitu metode ushul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh. Metode ushul fiqh antara lain adalah *qiyas, istihsan, 'urf, 'adah, mashlahah mursalah, dan istishab*.<sup>36</sup> Dengan metode ini umat Islam bebas menggunakan ijtihadnya untuk mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi sesuai dengan lingkungan, situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Tentu saja penggunaan metode ini tidak boleh bertentangan dengan semangat nash Al-Qur'an dan Hadis Nabi

#### 4. Kaidah-Kaidah Fiqh Siyasah

Adapun kaidah-kaidah fiqh yang dapat dijadikan sebagai pola untuk menentukan berbagai kebijaksanaan seorang pemimpin terhadap rakyatnya antara lain adalah:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Tindakan kebijakan imam (kepala negara) atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan".

Kaidah ini mengandung arti bahwa apapun kebijaksanaan pemerintah harus mempertimbangkan aspirasi rakyatnya. Sebab, kalau aspirasi rakyat tersebut

<sup>36</sup> J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 29.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak diperhatikan, maka keputusan pemerintah tidak akan efektif berlaku. Dalam hal ini, pemerintah tidak boleh menciptakan suatu peraturan perundang-undangan yang merugikan rakyat. Karena itu kebijaksanaan pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum, bukan untuk kepentingan golongan tertentu.<sup>37</sup>

الْوَلَايَةُ الْخَاصَّةُ أَقْوَى مِنَ الْوَلَايَةِ الْعَامَّةِ.

“Kekuasaan yang khusus lebih kuat (kedudukannya) dari pada kekuasaan yang umum”

Dalam fikih siyasah, ada pembagian kekuasaan sejak zaman ke khalifahan. Pembagian kekuasaan itu terus berkembang, maka muncul berbagai lembaga kekuasaan dalam suatu Negara. Maksud kaidah di atas adalah bahwa kekuasaan lembaga-lembaga yang khusus lebih kuat kekuasaannya dari pada lembaga umum.

لَا يُقْبَلُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ الْعُذْرُ بِجَهْلِ الْأَحْكَامِ

“Tidak diterima di negeri muslim, pernyataan tidak tahu hukum”

Sudah barang tentu yang dimaksud tidak tahu hukum di sini adalah hukum yang bersifat umum karena masyarakat semestinya mengetahui, seperti hukum mentaati *ulil amri* adalah wajib, zakat itu wajib, dan lain sebagainya.

### 5. Pengertian dan Ruang Lingkup Siyasah Maliyah

<sup>37</sup> Abdul Helim, *Kumpulan Kaidah Fikih tentang Siyasah/Politik/Kekuasaan*, artikel diakses pada 25 juni 2020 pukul 21.00 dari <http://4.bp.blogspot.com>

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kajian siyasah maliyah (kebijakan politik keuangan negara) dalam perspektif islam tidak terlepas dari al-quran, sunnah nabi, praktik yang dikembangkan oleh al-Khulafa' Rasyidun, dan pemerintahan islam sepanjang sejarah. Siyasah maliyah merupakan kajian yang tidak asing dalam islam, terutama setelah nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya menetap di Madinah. Siyasah maliyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan islam, karena ini menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.<sup>38</sup>

#### A. Sumber Keuangan Negara

##### 1. Zakat

Menurut istilah zakat merupakan harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

##### 2. *Khumus al-Ghana'im*

Harta ghanimah adalah harta yang diperoleh umat islam melalui jalan peperangan. Disamping ghanimah, terdapat dua bentuk rampasan lain yang diperoleh dari musuh. Pertama, *salb*, yaitu perlengkapan musuh yang dirampas oleh tentara muslim yang berhasil mengalahkan/membunuhnya. Kedua, *fai'*, yaitu harta musuh yang diperoleh tanpa peperangan. Ini merupakan konsekuensi yang diberikan musuh yang tidak mau tunduk kepada islam dan tidak melawan.

##### 3. *Jizyah*

<sup>38</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 317

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Jizyah* adalah pajak kepala yang dibayarkan oleh penduduk dar al-islam yang bukan muslim kepada pemerintah islam sebagai wujud loyalitas mereka terhadap pemerintah islam.

#### 4. 'Usyur al-Tijarah

'*Usyur al-Tijarah* adalah pajak perdagangan yang dikenakan kepada pedagang nonmuslim yang melakukan transaksi bisnis dinegara islam.

#### 5. *Kharaj*

Kharaj dapat diartikan sebagai pajak tanah atau pajak bumi

#### 6. Sumber-sumber lainnya dapat berupa

- a. Harta warisan yang tidak terbagi
- b. Kaffarat
- c. Dam atau Hadyah

### B. Pengeluaran dan Belanja Negara

Prinsip utama pengeluaran dan belanja negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menolongnya dari kesusahan hidup serta untuk kepentingan negara itu sendiri. Tercapainya kesejahteraan masyarakat merupakan langkah awal yang signifikan menuju kesejahteraan negara Islam (*welfare state*).

Ini diawali dengan cukupnya materi pada satu sisi dan meningkatkan kehidupan spiritual masyarakat pada sisi lain. Di sini letak uniknya kesejahteraan dalam islam yang mengutamakan kesejahteraan material duniawi, namun tidak melupakan dimensi spiritual rohaniah. Kedua-duanya sama-sama dipentingkan dan diperhatikan dalam islam. Dalam kerangka ini pula pendapatan, pengeluaran



dan belanja negara Islam berjalan sepanjang sejarah dan mesti dikembangkan pada masa sekarang dan yang akan datang.

Semua sumber keuangan negara yang diperoleh seperti yang diuraikan di atas dihimpun dalam kas negara (*bayt al-mal*). Mengenai sejarah munculnya lembaga ini terdapat perbedaan di kalangan para ahli. Sebagian mereka berpendapat bahwa bayt al-mal telah ada sejak zaman Nabi SAW. Berdasarkan hadits riwayat al-Bukhari yang menjelaskan bahwa pada suatu ketika umat islam memperoleh besar harta dari Bahrain. Pada saat itu nabi memerintahkan kepada umat Islam untuk mengumpulkannya di masjid. Setelah meminta petunjuk dari Allah swt, Nabi akhirnya membagi-bagikan harta tersebut kepada para sahabat. Dari riwayat ini tampak nabi telah memfungsikan masjid sebagai kantor kas negara.

Sebagian ulama berpendapat bahwa *bayt al-mal* baru muncul pada masa Abu Bakar, sebagaimana dikemukakan Ibn Sa'd. Menurutnya abu bakar telah mempunyai sebuah bangunan sebagai tempat penyimpanan harta negara.

Mengenai pembelanjaan dan pengeluaran negara, sebagaimana dijelaskan dalam sejarah pemerintahan Islam, harus mempertimbangkan kebutuhan negara dan warganya, yaitu:

1. Untuk orang-orang fakir miskin;
2. Untuk meningkatkan profesionalisme tentara dan rangka pertahanan dan keamanan negara;
3. Untuk meningkatkan supremasi hukum;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Untuk membiayai sektor pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang bertakwa dan berilmu pengetahuan yang luas;
5. Untuk membayar gaji pegawai dan pejabat negara;
6. Untuk pengembangan infrastruktur dan sarana/prasarana fisik;
7. Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat;
8. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Pengelolaan dan pendistribusian keuangan negara sebenarnya bukan hanya terbatas pada komponen yang disebutkan di atas, mengingat dalam pengeluaran dan belanja negara tidak terlepas darimana sumber pendapatan negara itu berasal. Seperti diuraikan sebelumnya, sumber pendapatan dapat dibedakan ke dalam tiga kelompok. Yang pertama dan kedua adalah zakat dan *ghanimah/fai*'. Pengeluaran kedua kelompok ini diatur berdasarkan ketentuan Allah dan Rasul. Sementara kelompok ketiga, seperti *kharaj*, *jizyah*, dan *kaffarat*, merupakan harta yang dimanfaatkan untuk kepentingan belanja negara secara umum. Diantara pos-pos pengeluaran dan belanja negara yang terpenting adalah:

Memberantas kemiskinan

Pemerintah islam bertanggungjawab penuh dalam menata ekonomi negara agar dapat memenuhi kebutuhan hidup semua golongan masyarakat. Islam tidak membenarkan pemilikan aset kekayaan negara hanya berputar disekitar orang-orang kaya semata. Ini merupakan amanat Islam bagi penguasa. Islam menginginkan kesejahteraan itu terwujud bagi seluruh makhluk Allah swt di muka bumi ini. Salah satu bentuk tugas pemerintah islam dalam mencapai maksud

tersebut adalah memberantas kemiskinan dalam masyarakat dan memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka melalui pengeluaran dan belanja negara. Ini tidak hanya melalui zakat, namun juga melalui sumber-sumber keuangan lainnya.

Minimal negara harus dapat memenuhi kebutuhan asal masyarakatnya yang meliputi kebutuhan makanan, perumahan yang nyaman dan sandang atau pakaian yang cukup.

#### Pertahanan negara

Pemerintah perlu mengalokasikan belanja negara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara yang secara khusus berada dalam tanggung jawab militer. Salah satu ciri negara yang kuat adalah kuatnya sektor militer dan tingginya tingkat komitmen mereka dalam pertahanan dan keamanan negara. Karena itu, negara harus mengeluarkan belanja yang layak dan proporsional untuk sektor ini. Pengeluaran ini antara lain untuk peningkatan gaji personil militer, peningkatan kemampuan dan profesionalitas merek, dan biaya-biaya operasional militer lainnya, seperti membeli perlengkapan perang. Pengeluaran belanja yang wajar dan proporsional akan menjadikan militer negara sebagai benteng yang kokoh, sehingga tidak mudah disusupi oleh infiltrasi-infiltrasi asing maupun gangguan dalam negeri.<sup>39</sup>

#### Pembangunan hukum

Pembangunan hukum merupakan hal yang penting dalam menata kehidupan dan ketertiban suatu negara. Dapat dipastikan, bila hukum tidak tegak dalam suatu negara, maka negara itu akan mengalami kehancuran disemua sendi

---

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm.339



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan masyarakatnya. Pada akhirnya negara akan hancur. Penegakan hukum pada suatu negara bukan hanya demi terwujudnya keamanan jiwa setiap anggota masyarakatnya, melainkan juga demi terciptanya stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya.<sup>40</sup>

Karena itu, pemerintah Islam harus mengalokasikan belanja negara untuk pembangunan hukum ini. Pengeluaran belanja di bidang pembangunan hukum antara lain untuk meningkatkan kualitas hakim, peningkatan taraf kesejahteraan hakim dan penciptaan produk-produk hukum yang antisipatif dan responsif terhadap perkembangan dan tantangan yang dihadapi.

Jadi pada prinsipnya pembangunan hukum harus dapat melindungi setiap anggota masyarakat dan menciptakan persamaan antara sesama anggota masyarakat, sehingga orang-orang yang lemah tidak merasa putus asa bila berhadapan dengan orang yang kuat dan berkuasa. Hukum, bukan kekuasaan harus dijadikan sebagai panglima dalam masyarakat islam.

#### Pembangunan Infrastruktur dan Fasilitas Sosial

Pengeluaran belanja negara dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur fisik dan fasilitas sosial lainnya. Hal ini penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat yang sehat dan makmur.

Karena itu, pemerintah harus mengarahkan investasi bidang modal fisik pada pembangunan ekonomi untuk kepentingan sosial yang lebih besar, meskipun terkadang kurang menarik.<sup>41</sup>

#### Pendidikan

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm.339

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm.340

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah sepatutnya memberikan perhatian yang lebih besar pada sektor pendidikan, karena pendidikan merupakan hal penting dan syarat mutlak bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Wujud perhatian pemerintah dapat dilihat dari berapa besar dana belanja negara untuk kepentingan sektor ini. Semangat pentingnya pendidikan dapat dilihat dari pernyataan Nabi bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap muslim. Usaha pendidikan bukan hanya sekadar membebaskan rakyat dari buta aksara. Ini barulah tahap awal dari aspek penciptaan sumber daya manusia yang andal. Tujuan pendidikan dalam islam adalah melahirkan pribadi-pribadi muslim yang dapat menyesuaikan diri dengan cita-cita yang terkandung dalam ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi, mengarahkan perubahan yang terjadi dalam masyarakat dalam masyarakat pada lingkungan yang Islami, mengajarkan keterampilan yang selalu baru dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta menstimulasikan insentif riset dan penemuan-penemuan teknik baru pengolahan sumber daya dari Allah swt secara lebih efisien<sup>42</sup>

#### 6 Konsep Kekuasaan dalam Siyash Dusturiyah

Kekuasaan (*sulthah*) dalam konsep negara Islam, oleh Abdul Wahhab Khalaf dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Lembaga legislatif (*sulthah tasyri'iyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang.

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm 341

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Lembaga eksekutif (*sultah tanfidhiyyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang berfungsi menjalankan undang-undang
- c. Lembaga yudikatif (*sultah qadha'iyyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Adapun pentingnya kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya hak, melindungi orang yang kehilangan hak-haknya, mengawasi harta wakaf dan lain-lain.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam upaya-upaya pemanfaatan fasilitas pembangunan 3 Pilar Kuantan Singingi, Pemerintah Daerah telah menetapkan beberapa kebijakan di antaranya menetapkan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pelunasan sisa pembayaran megaprojek pembangunan 3 Pilar Kuantan Singingi.
2. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap pemanfaatan fasilitas pembangunan 3 Pilar belum maksimal karena masih terdapat beberapa kendala di antaranya: a.) Pemerintah belum menemukan regulasi yang tepat untuk menghibahkan bangunan Universitas kepada pihak Yayasan Perguruan Tinggi Islam Kuantan Singingi; b.) Untuk pemanfaatan hotel, hingga saat ini belum terbentuk Tim Khusus yang akan ditugaskan untuk mengaudit bangunan hotel agar dapat dianggarkan dana untuk perbaikan hingga layak untuk difungsikan; c.) dari segi hukum atau regulasi yang mengakibatkan pemerintah tidak berani untuk menetapkan suatu kebijakan tanpa ada dasar hukum yang jelas.
3. Tinjauan Fiqh Siyasah yang berkaitan dengan permasalahan ini adalah Siyasah Dusturiyah, dimana keterkaitan hubungan antara Pemerintah



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang penulis peroleh mengenai Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap upaya pemanfaatan fasilitas pembangunan 3 Pilar , maka penulis memberikan saran yaitu:

1. Kepada Pemerintah Daerah agar dapat bersinergi dengan semua instansi atau lembaga terkait untuk segera memecahkan permasalahan ini. Karena Islam mengajarkan untuk tidak melakukan tindakan pembaziran. Konsistensi Pemerintah juga sangat diharapkan mengingat sudah banyak tahapan yang dilalui untuk pemanfaatan fasilitas 3 Pilar Kuantan Singingi.
2. Kepada masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi untuk lebih peduli terhadap pemanfaatan aset yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi seminimalnya dengan cara menjadi kontrol bagi pemerintah, dan bagi masyarakat kalangan akademis diharapkan mampu mengupayakan diri agar dapat mengkawal jalannya proses penyusunan kebijakan agar pemerintah lebih maksimal dalam menetapkan satu kebijakan atau suatu rancangan pembangunan di Kabupaten Kuantan Singingi . Juga kepada Ninik Mamak di lingkungan adat agar senantiasa memberi



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nasihat dan pandangan terhadap kemenakan yang menduduki jabatan sebagai pemerintah di Kabupaten Kuantan Singingi

3. Kepada peneliti selanjutnya, penulis berharap agar pengumpulan data dari berbagai sumber dan referensi untuk diperbanyak lagi agar penelitian lebih baik dan lebih lengkap lagi kedepannya.



UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Djazuli , *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana 2010)
- Siyasaah; *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003)
- Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Studi Tentang Peraturan dalam Konstitusi Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: LP3ES, 1985)
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, ( Jakarta: PT Rajawali Persada, 2003)
- Artis, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, (Pekanbaru: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim riau, 2014)
- Bambang Waluyo, *Penelitian hukum dalam Praktek*, (Jakarta: sinar Grafika, 2002)
- Burhan.Bungin, *Penelitian Kualitatif: Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Putra Grafika 2007)
- Damang Averroes, *Beda Keputusan dan Kebijakan* diakses pada 11 Juli 2020 pukul 21.20 WIB dari <https://negarahukum.com/beda-putusan-dan-kebijakan.html>
- Beni Thaimiyah, *Siyasaah Syar'iyah : Etika Politik Islam* (Surabaya: Risalah Gusti,1995)
- I. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasaah* ,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1997)
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Prenadamedia Group, 2014)

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mujar Ibn Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Gubernur Riau Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Ridwan Nurdin, *Konsep Dan Teori Manajemen Aset Dalam Islam*, Jurnal (Media Syari'ah:2017) Vol.19.No 2.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 24 tahun 2012 Tentang Pembentukan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan Sentajo Raya Dan Kecamatan Pucuk Rantau

Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011-2016

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang PTUN

Sholih Muadi, *Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik* , Jurnal (Review Politik:2016) Vol.06. No. 02 hlm. 197



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Veithzal Rivai, Arviyan Arivin, *Islamic Leadership*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009) hlm.225.

Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah Alih Bahasa Kathun Suhadi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994)

Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud diakses pada 12 Juli 2020 dari <https://dapo.disdakmen.kemendikbud.go.id>

Sejarah Kabupaten Kuantan Singingi , diakses pada 25 April 2020 WIB. Dari <https://kuansing.go.id>

Profil Bappedalitbang Kuantan Singingi diakses pada 29 April 2020 pukul 14.00 WIB, dari <https://bappedalitbang.kuansing.go.id/>

Abdul Helim, *Kumpulan Kaidah Fikih tentang Siyasah/Politik/Kekuasaan*, artikel diakses pada 25 Juni 2020 dari <http://4.bp.blogspot.com>





# LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim R

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Wawancara dengan Kepala Bappedalitbang Kabupaten Kuantan Singingi**



**Wawancara dengan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kuantan Singingi**

## © Hak

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Bangunan Universitas Islam Kabupaten Kuantan Singingi**



© Hak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Bangunan Pasar Berbasis Modern Kuantan Singingi**

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Bangunan Pasar Berbasis Modern Kuantan Singingi**



## © Hak

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Bangunan Hotel Kuantan Singingi**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

**BERITA ACARA SEMINAR USUL PENELITIAN**

- |                                    |                                                                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. N A M A                         | : Zikra yunilasmi                                                                                                      |
| 2. NOMOR MAHASISWA                 | : 11624204125                                                                                                          |
| 3. JUDUL USUL PENELITIAN           | : Kebijakan pemerintah kabupaten kuantan singingi<br>terhadap program pembangunan 3 pilar dalam tinjau<br>fiqh siyasah |
| 4. Hari/Tgl. Diseminarkan          | : Selasa / 05 November 2019                                                                                            |
| 5. Hasil Seminar dirumuskan adalah | :                                                                                                                      |
| a. Judul                           | : Disetujui / Ditolak / <del>Disempurnakan</del>                                                                       |
| b. Latar Belakang Masalah          | : <del>Jelas/Masih Kabur</del> /Perlu Perbaikan                                                                        |
| c. Permasalahan                    | : <del>Jelas / Masih Kabur</del> / Dirumuskan kembali agar menjadi<br>jelas                                            |
| d. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  | : Jelas / Mengambang / Perlu Perbaikan                                                                                 |
| e. Kerangka Teoritis (jika ada)    | : Jelas / Kurang Jelas / Perlu Disempurnakan                                                                           |
| f. Rumusan Hipotesis (jika ada)    | : Cukup Tajam / Perlu Dipertajam                                                                                       |
| g. Metode Penelitian               | : Jelas / Masih Kabur / Perlu Perbaikan                                                                                |
| h. Daftar Pustaka                  | : Cukup / <del>Belum untuk mendukung pemecahan masalah</del><br>yang diteliti                                          |

Demikianlah keputusan Tim Seminar disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk selanjutnya  
disampaikan kepada Dekan / Wakil Dekan I

NARASUMBER

H. M. Abdi Almaktsur, MA

Catatan :  
Perubahan Judul dalam Seminar  
Dikonsultasikan dengan WD I



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul **KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TERHADAP PEMANFAATAN FASILITAS PEMBANGUNAN 3 PILAR DALAM TINJAUAN FIQH SIYASAH** ditulis oleh saudari :

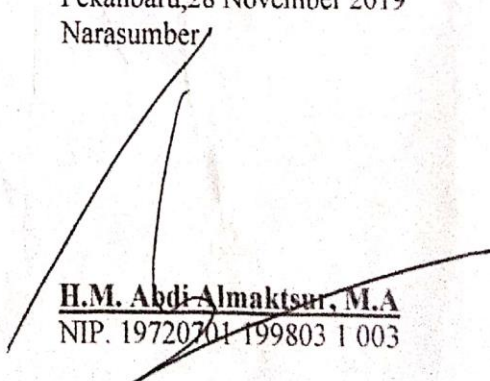
Nama	: ZIKRA YUNILASMI
NIM	: 11624204125
Program Studi	: HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
Diseminarkan pada :	
Hari / Tanggal	: KAMIS, 05 NOVEMBER 2019
Narasumber	: H.M. Abdi Almaktsur, M.A

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Kepala Bagian Tata Usaha  
Fakultas Syariah dan Hukum

  
**Erni, S.Sos., MM**  
NIP. 19680226 199103 2 002

Pekanbaru, 28 November 2019  
Narasumber

  
**H.M. Abdi Almaktsur, M.A**  
NIP. 19720701 199803 1 003



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**  
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN  
SINGINGI  
Telp. (0760) 561604-561605 KODE POS 29562  
**TELUK KUANTAN**

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor:175 / SETWAN-UM/2020/

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUDARMO, S.Pd**  
NIP : 19641011 198512 1 002  
Jabatan : Kepala Bagian Umum

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **ZIKRA YUNILASMI**  
NIM : 11624204125  
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA

Benar telah melaksanakan Riset di Sekretariat DPRD Kabupaten Kuantan Singingi pada Bagian Umum, Bagian Keuangan, dan Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan. Dalam melaksanakan Riset kami sudah melakukan pengawasan dan bimbingan kepada yang bersangkutan, sehingga Riset dapat berjalan dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Teluk Kuantan , 27 Februari 2020

Sekretaris DPRD Kabupaten Kuantan Singingi

A/n Kabag Umum



**SUDARMO, S.Pd**  
NIP. 19641011 198512 1 002



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : dpmtsp@riau.go.id



1.04.02.01

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/30809  
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/843/2020 Tanggal 12 Februari 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

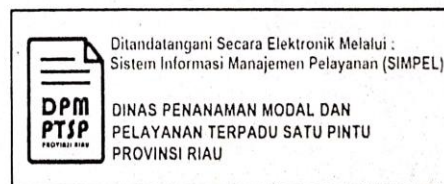
- |                      |   |                                                                                                                                          |
|----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama              | : | SIKRA YUNILASMI                                                                                                                          |
| 2. NIM / KTP         | : | 11624204125                                                                                                                              |
| 3. Program Studi     | : | HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)                                                                                                              |
| 4. Jenjang           | : | S1                                                                                                                                       |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU                                                                                                                                |
| 6. Judul Penelitian  | : | KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI<br>TERHADAP PEMANFAATAN FASILITAS PEMBANGUNAN 3 PILAR<br>DALAM TINJAUAN FIQH SIYASAH     |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. KANTOR BUPATI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI<br>2. KANTOR DPRD KABUPATEN KUANTAN SINGINGI<br>3. KANTOR BAPPEDA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 12 Februari 2020



**Tembusan :**

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kuantan Singingi  
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Telukkuantan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru





**PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KAB. KUANTAN SINGINGI  
TELP (0760) 561627 KODE POS 29562 TELUK KUANTAN

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 050/Bappedalitbang-S/73

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kuantan Singingi, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: ZIKRA YUNILASMI
Nim	: 11624204125
Jurusan	: HUKUM TATA NEGARA ( SIYASAH )
Jenjang Pendidikan	: S-1
Alamat	: PEKANBARU
Judul Penelitian	: KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TERHADAP PEMANFAATAN FASILITAS PEMBANGUNAN 3 PILAR DALAM TINJAUAN FIQH SIYASAH

Yang namanya tersebut diatas telah melaksanakan pengumpulan data dan penelitian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kuantan Singingi untuk bahan penulisan skripsi dengan judul "*Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Pemanfaatan Fasilitas Pembangunan 3 Pilar dalam Tinjauan Fiqih Siyasah*"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, 27 Februari 2020

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

  
**Ir. H. MAISIR**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660517 199003 1 004

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**ZIKRA YUNILASMI**, Lahir di Teluk Kuantan pada tanggal 29 Juni 1998 Anak pertama dari empat bersaudara, dari pasangan ayahanda, Ramadan S.Pd dan Emi Darnis S.Pd. Pendidikan Formal yang ditempuh oleh penulis adalah SD Negeri 002 Simpang Tiga Teluk Kuantan, Kuantan Singingi, RIAU, lulus pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan di

SMPN 7 Teluk Kuantan, lulus tahun 2013, Setelah menyelesaikan pendidikan SMP, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri Pintar Kuantan Singingi dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian dengan judul “***Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam Upaya Pemanfaatan Fasilitas Pembangunan 3 Pilar Perspektif Fiqh Siyasah***”.. Penulis dinyatakan lulus pada sidang munaqasyah tanggal 11 Agustus 2020 jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan IPK terakhir 3.59 (Cumlaude) dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum

(SH)